

**IMPLEMENTASI TATA RUANG WILAYAH DALAM
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG**

**(Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan,
dan Pertamanan Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ZAENAL FACHRUDIN

0710313041



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2011

MOTTO

Suka menunda bukanlah penyakit keturunan, tetapi penyakit mental hasil dari kebiasaan yang sengaja kita biarkan berjalan. Untuk bebas dari penyakit menunda, tidak ada cara yang paling efektif, kecuali kita harus "tegas" dan "keras" pada diri sendiri! Dengan demikian, SUKSES BESAR baru bisa tercipta!

(Mario Teguh)



RINGKASAN

Fachrudin, Zaenal, 2011, **IMPLEMENTASI TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG** (Studi pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang), Prof. Bambang Supriyono, M.S, Drs Heru Ribawanto, M.S, 143 Hal + ix

Dalam RTRW Jawa Timur, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai pintu gerbang barat menuju kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) dan hal ini membuat kawasan Kabupaten Jombang sangat strategis sehingga sangat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang. Pengembangan wilayah Jombang ini nantinya akan didukung dengan akses jalan tol Jombang-Mojokerto-Surabaya yang saat ini dalam proses pembangunan. Pembangunan jalan tol ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jombang. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Jombang sedang melakukan suatu perencanaan pengembangan pembangunan, dengan didominasi proyek fisik yang berskala nasional. Pemerintah daerah pun akan melakukan regulasi dalam pengelolaan dan penataan ruang wilayah bagi proyek-proyek tersebut. Sehingga nantinya pembangunan daerah Jombang akan lebih komprehensif dan terarah sesuai RTRW. Permasalahan pun nantinya juga akan muncul, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengetahui serta menganalisa hal tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, dilakukan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pemanfaatan data sekunder sebagai pendukung informasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah, serta keserasian pembangunan antar sektor dan juga penyesuaian pemanfaatan tataguna lahan. Sementara perkembangan wilayah bisa sangat dinamis, sehingga eksistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai panduan arah kebijakan pembangunan berpotensi mengalami penyimpangan dalam implementasinya.

Sebagai akhir dari seluruh kajian, peneliti merasa perlu memberikan saran serta masukkan dalam mewujudkan penataan ruang dalam pengembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Jombang yang lebih komprehensif serta memperhatikan berbagai kepentingan seluruh stakeholder. Perkembangan ekonomi supaya lebih difokuskan pada pengembangan sentra-sentra produksi agropolitan, pariwisata, pertambangan dan pengembangan industri menengah hingga industri besar. Pengembalian fungsi lindung juga harus menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.

SUMMARY

Fachrudin, Zaenal, 2011. **THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL SPACE ORDER IN THE LOCAL DEVELOPMENT OF THE JOMBANG REGENCY** (A Study at The Official of Public Works for Space Order Design, Cleanliness, and Gardening of Jombang Regency). Supervisor: Prof. Bambang Supriyono, M.S. Co-supervisor: Drs. Heru Ribawanto, M.S. 143 pages + ix

In pursuant to East Java's Regional Space Order Plan (RTRW), the Jombang Regency has been determined as the west gate toward the region of Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan). It gives the Jombang Regency with very strategic position to attract the investors' interest to develop their potential at Jombang Regency. The development of Jombang region will be supported by the access of toll road Jombang-Mojokerto-Surabaya which is still under construction. This toll road construction will increase the economic growth of Jombang inhabitant. With this elaboration, it is then acknowledged that the Jombang Regency is planning for the development dominated by some physical projects at national level. The local government will regulate the management and ordering of regional space in favor of these projects. It is necessary to obtain more comprehensive local development of Jombang region which is consistent to RTRW. In a case when the problem comes up, the author must understand and analyze it immediately.

Research type is descriptive study with qualitative approach. In order to facilitate the author in conducting a research, data collection methods are considered involving interview, documentation, and the use of secondary data as the information support.

Result of research indicates that the implementation of RTRW is aimed at realizing the integration, interdependence and balance of development between regions, creating the harmony of development between sectors and ensuring the consistency of each land use order. The region can develop very dynamic, and therefore, RTRW as the manual of development policy direction may be mislead from its expected operation.

With respect to these reviews, the author may suggest that some inputs should be necessary to produce space order which is consistent to more comprehensive urban development at the Jombang Regency. Stakeholders' interest must be emphasized. The economic development should be focused on agropolis production centers, tourism, mining, and middle-large industries. The recovery of the protection function can be given a priority to keep the stability of environment supportability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul Implementasi Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Jombang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang tulus dan penuh hormat penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Hadi Suwignyo dan Ibu Siti Aminah yang telah mendidik dan mencurahkan segenap kasih sayang serta kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. M.R Khairul muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran serta selalu memberi masukan agar skripsi lebih sempurna.
5. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran serta selalu memberi masukan agar skripsi lebih sempurna.
6. Bapak Rudi selaku Staff Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian hingga terselesaikan skripsi ini.

7. Seluruh pegawai Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu selama menempuh masa studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
9. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan do'a restunya hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Keluarga besar Bapak Rudihani yang telah memberikan dukungan dan do'a restunya hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Saudari Deenda Putri Duta Natalia yang telah memberikan dukungan dan do'a restunya hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Para sahabat dan teman-teman S1 Administrasi Publik khususnya angkatan 2007 yang telah bersedia membantu dan atas segala dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan anda. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 Juni 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	14
1. Pengertian administrasi pembangunan	14
2. Pengertian perencanaan pembangunan	16
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	17
4. Program pembangunan	21
5. Pembangunan perkotaan	22
6. Strategi pembangunan perkotaan	24
B. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	25
1. Pengertian implementasi kebijakan	25
2. Pengertian perencanaan	28
2.1. Unsur-unsur perencanaan.....	30
2.2. Tipe-tipe perencanaan.....	32
3. Pengertian tata ruang.....	32
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	34
4.1. Pengertian RTRW	34
4.2. Fungsi dan tujuan RTRW	38
C. Pengembangan Wilayah.....	39
1. Pengertian pengembangan	39
2. Teori pengembangan kota.....	39
2.1. Pengertian kota.....	42
2.2. Ciri-ciri umum kota.....	43
3. Fungsi kota.....	44



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	54
1. Sejarah Kabupaten Jombang	54
2. Kondisi wilayah Kabupaten Jombang	55
2.1. Kondisi fisik dasar	58
2.2. Aspek kependudukan dan sumber daya manusia	68
2.3. Potensi ekonomi wilayah.....	71
3. Profil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan	78
B. Penyajian Data Fokus	92
1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Jombang	92
1.1. Pembagian wilayah pembangunan	92
1.2. Sistem dan fungsi perwilayahan.....	94
1.3. Strategi pengembangan daerah.....	105
2. Pemanfaatan tata ruang dalam upaya pengembangan pembangunan daerah	106
2.1. Pemanfaatan lahan.....	106
2.2. Penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum.....	113
2.3. Distribusi dan kepadatan penduduk.....	120
3. Faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi tata ruang wilayah dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Jombang	122
3.1. Faktor pendorong.....	122
3.2. Faktor penghambat	124
C. Analisis Data Fokus	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

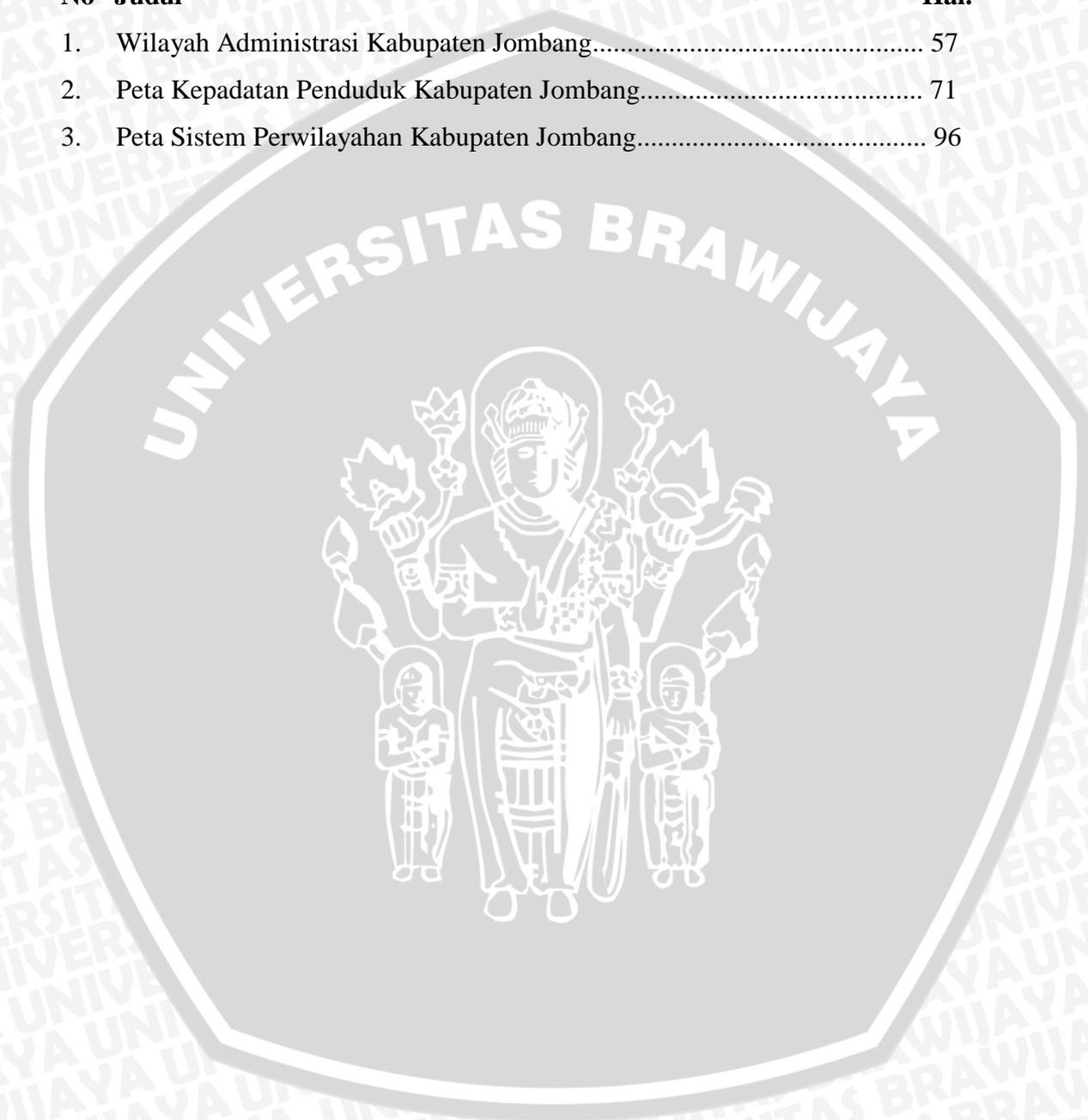


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang	58
2.	Kondisi Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Jombang	59
3.	Luas Daerah Menurut Struktur Geologi Kabupaten Jombang	62
4.	Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Kabupaten Jombang	64
5.	Nama, Luas dan Kemampuan Waduk Mengairi Sawah Di Kabupaten Jombang	65
6.	Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Tanah Di Kabupaten Jombang	67
7.	Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan 2003-2008	69
8.	Kepadatan Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan 2003-2008	70
9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2005	77
10.	Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2011	86
11.	Prasarana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang	92
12.	Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Jombang	98
13.	Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Mojoagung	99
14.	Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Ploso	101
15.	Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Bandar Kedungmulyo	103
16.	Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Mojowarno	105
17.	Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Jombang Tahun 2005	116
18.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Jombang Tahun 2001-2006	121

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang.....	57
2.	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Jombang.....	71
3.	Peta Sistem Perwilayahan Kabupaten Jombang.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar 1. Distribusi Kegiatan di WP Jombang
2. Gambar 2. Distribusi Kegiatan di WP Mojoagung
3. Gambar 3. Distribusi Kegiatan di WP Ploso
4. Gambar 4. Distribusi Kegiatan di WP Bandar Kedungmulyo
5. Gambar 5. Distribusi Kegiatan di WP Mojowarno
6. Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Jombang
7. Surat Keterangan Penelitian oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
8. Surat Keterangan Penelitian oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah lebih maju. Begitu juga dengan apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk bisa lebih maju. Firman dan Sirait (1984: 4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu proses yang terus-menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya”. Administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang berorientasi kearah pembangunan karena merupakan bagian dari kegiatan pembangunan, selain itu menurut Tjokroamidjojo (1974 : 222) bahwa:

“Administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respons dan kerja sama seluruh rakyat”.

Dalam pembangunan suatu wilayah sangat perlu dilakukan perhitungan yang tepat agar tidak selalu terkonsentrasi pada daerah pusat perkotaan. Pola pembangunan yang selalu berorientasi pada daerah pusat perkotaan menjadikan laju urbanisasi berjalan dengan cepatnya, pada umumnya urbanisasi tersebut tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir masyarakat dari perdesaan menjadi

pola pikir perkotaan. Keadaan seperti ini justru merugikan para urban sendiri, serta akan menjadi beban masyarakat kota pada umumnya, dan pengelola kota pada khususnya. Hal tersebut tercermin dari lebih tingginya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan serta adanya peningkatan pengangguran dan kriminalitas perkotaan.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah lebih dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.

Dalam sejarah pelaksanaan penataan ruang terbit beberapa peraturan, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri No.: 30 tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/ Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan, yang diikuti dengan terbitnya: (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, dan (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Kedua peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan acuan para pihak terlibat dalam penyusunan tata ruang kota, sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang.

Selanjutnya disempurnakan, hingga sekarang terbit peraturan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rujukan regulasi tentang RTRW telah mengalami perubahan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 26 Tahun 2007. Selain itu, diikuti dengan beberapa regulasi yang juga berubah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ketelitian Penggunaan Peta dalam Tata Ruang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No: 16 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan RTRW serta Permen PU No: 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Analisa dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Sebagai salah satu proses kegiatan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Upaya pemanfaatan ruang ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang. Sesuai dengan

amanat Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 ayat (1-3) telah ditetapkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Sehingga perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu wewenang daerah otonom, dan disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerah yang mencakup unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal pengaturan penataan ruang dan berperan memfasilitasi serta melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala nasional. Sebagai upaya dalam

menterpadukan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan dalam pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari suatu wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tata ruang merupakan suatu wujud dari struktur ruang dan pola ruang yang dapat diimplementasikan dalam suatu perencanaan dan pembangunan kota. Pembangunan dan pengembangan perkotaan yang dilakukan suatu daerah diharapkan akan dapat menciptakan suasana kota yang terarah.

Implementasi otonomi daerah, masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain : (1) Kesenjangan dalam dan antar wilayah, (2) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) Sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, (5) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/ sektoral), (6) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan (7) Terakumulasinya modal di

kawasan perkotaan. Sedikitnya ada dua hal yang selalu dipertimbangkan dengan adanya otonomi daerah, yaitu :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Dahlan Thaib, 2000, : 85-86)

Dengan adanya otonomi daerah membuat Jombang lebih giat dalam melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan sekarang berdasarkan perencanaan pembangunan melalui RTRW Kabupaten Jombang. RTRW Kabupaten Jombang nantinya diharapkan dapat sebagai acuan pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan sesuai UU 26 tahun 2007. Sehingga untuk memperkuat posisi RTRW sebagai rencana pembangunan daerah, akan ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemerintah daerah saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan RTRW, yaitu Perda No.21 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Wilayah Kabupaten Jombang terbagi dalam 21 kecamatan, yang mencakup 302 desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Jombang. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Jogjakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban. Umlah penduduk Kabupaten Jombang adalah 1.165.720 jiwa (2005). Sedikitnya 55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jombang sebesar 997 jiwa/km². Konsentrasi sebaran penduduk terutama di Kecamatan Jombang (dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni 3.198 jiwa/km²), Kecamatan Tembelang (bagian selatan), Kecamatan Peterongan (bagian tengah dan selatan), Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno (bagian utara dan timur), sepanjang jalan raya Jombang-Peterongan-Mojoagung-Mojokerto, serta sepanjang jalan raya Jombang-Diwék-Blimbing-Ngoro-Kandangan. Kawasan padat penduduk lainnya adalah kawasan perkotaan di kecamatan Ploso, Perak, dan Ngoro. Bagian barat laut (yang merupakan perbukitan kapur) dan bagian tenggara (yang merupakan daerah pegunungan) merupakan kawasan yang memiliki kepadatan penduduk jarang. Pertumbuhan penduduk sebesar 0,68% per tahun, sehingga Kabupaten Jombang tidak mengalami permasalahan ledakan penduduk. Kabupaten Jombang dapat dikatakan merupakan salah satu wilayah agraris di Jawa Timur, sedikitnya 42% lahan di Jombang digunakan sebagai area persawahan. Komoditas andalan dari sektor

perkebunan Kabupaten Jombang di tingkat provinsi adalah tebu. Serta hampir 20% wilayah Kabupaten Jombang merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut terdapat di bagian utara (kecamatan Plandaan, Kabuh, Kudu, dan Ngusikan) serta bagian tenggara Kabupaten Jombang (kecamatan Wonosalam, Bareng, dan Mojowarno).

Kabupaten Jombang saat ini tengah bersiap mengembangkan wilayahnya sebagai sentra agribisnis dan wilayah pengembangan industri yang berbasis pada potensi lokal. Hal tersebut dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang 2009-2028 yang dibahas pada forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Bupati Jombang Suyanto mengatakan bahwa RTRW tersebut diharapkan benar-benar dapat digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang untuk 20 tahun ke depan. Kabupaten Jombang merupakan lumbung padi Provinsi Jawa Timur. Kurang lebih sekitar 55% produksi panen Jombang surplus. Terkait sektor industri, bahwa 96 % industri yang berkembang di Kabupaten Jombang adalah industri kecil-menengah, terutama kerajinan dan makanan khas Jombang. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai pintu gerbang barat menuju kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), karena letaknya yang strategis. Hal ini akan sangat menarik minat investor untuk memindahkan lokasi industri dari Surabaya ke Kabupaten Jombang, apalagi saat ini Surabaya sudah diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa sehingga mulai meninggalkan pengembangan sektor industri, hal tersebut didukung pula dengan akses jalan tol Surabaya-

Mojokerto-Kertosono melalui Jombang yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah.

Jaringan Jalan Propinsi yang melalui Kabupaten Jombang memiliki peranan yang sangat penting sebagai penghubung antar kabupatenkabupaten di Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah. Jalan tersebut merupakan salah satu bagian dari Jalan Trans Jawa Bagian Selatan (Jalur Sisi Selatan), yang juga berfungsi sebagai pendukung aktivitas pertumbuhan ekonomi regional. Sehubungan dengan itu, maka dibangunlah Jalan Lingkar Mojoagung-Jombang yang tujuannya adalah sebagai salah satu sarana pengembangan wilayah regional yang berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat sekitar, serta untuk memberikan akses yang lebih baik kepada pengguna jalan.

Berdasarkan data BAPPEDA mengenai evaluasi dan revisi RTRW sebelumnya digambarkan bahwa kegiatan pembangunan di Jombang dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada. Data yang ada mengatakan bahwa dalam perjalanan implementasi tata ruang kota Jombang sebelumnya terdapat penyimpangan RTRW yang telah ditetapkan, hal itu tercermin adanya pembangunan industri besar di lahan yang tidak sesuai peruntukannya, serta tumbuhnya ruko-ruko di daerah yang tidak seharusnya didirikan pertokoan.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang strategis di Provinsi Jawa Timur, sehingga sekarang ini sedang gencarnya dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan, dengan didominasi proyek-proyek fisik yang

berskala nasional. Pemerintah daerah pun nantinya juga akan melakukan regulasi-regulasi dalam pengelolaan dan penataan ruang kota bagi proyek-proyek tersebut. Sehingga nantinya suatu pembangunan daerah Jombang akan lebih komprehensif dan terarah sesuai RTRW yang sudah dibuat. Permasalahan-permasalahan pun nantinya juga akan muncul, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengetahui serta menganalisa hal tersebut.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“IMPLEMENTASI TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini nantinya akan melihat fenomena-fenomena dari pembangunan kabupaten Jombang yang sedang berjalan. Untuk itu dalam menemukan dan meneliti fenomena tersebut, maka peneliti memerlukan suatu acuan awal dalam bentuk suatu rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pengembangan pembangunan daerah melalui rencana tata ruang wilayah?
2. Bagaimanakah implementasi pengembangan pembangunan daerah melalui tata ruang wilayah?
3. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat pengimplementasian tata ruang wilayah dalam upaya pengembangan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pola kebijakan pengembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Jombang melalui perencanaan tata ruang wilayah.
2. Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Jombang melalui perencanaan tata ruang wilayah.
3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi tata ruang wilayah dalam upaya pengembangan Kabupaten Jombang.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan sarana untuk mengaktualisasikan berbagai ilmu yang telah diterima dalam perkuliahan.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan pengembangan pembangunan tata ruang di wilayah Kabupaten Jombang.
 - c. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk perbaikan dalam hal pelaksanaan pembangunan. Sehingga, instansi tersebut bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi penataan ruang periode berikutnya.
- c. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- d. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam keberhasilan pelaksanaan pengembangan pembangunan tata ruang di wilayah Kabupaten Jombang.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pembahasan sehingga lebih terarah secara sistematis maka penulisan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tinjauan teoritis yang digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan masalah yang diambil oleh peneliti yang berfungsi untuk pemecahan masalah tersebut. Teori-teori yang disajikan dalam bab ini terdiri dari bahasan dan pengertian pokok

mengenai konsep sistem jaringan, pengertian dan strategi pelayanan publik, serta konsep kepuasan masyarakat.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum mengenai implementasi tata ruang Kabupaten Jombang dan data-data yang dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal tercantum dalam fokus penelitian.

Kemudian data yang telah dihimpun tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Pembangunan di negara berkembang dikenal dengan istilah administrasi pembangunan. Berdasarkan pendapat Siagian (2007 : 4) administrasi pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha/rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunannya ditujukan kepada usaha untuk membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas maka administrasi pembangunan di definisikan sebagai “Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua

segi kehidupan dan penghidupan negara, bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya” (Siagian, 2007: 5).

Kemudian menurut Tjokroamidjojo (1974: 9-10) menyimpulkan ciri-ciri dari administrasi pembangunan diantaranya:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*innovation*) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa yang akan datang.
- d. Lebih beorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
- f. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Berdasarkan ciri-ciri di atas, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi utama yaitu: sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*) serta perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of development*). Sedangkan administrasi untuk pembangunan di bagi dalam dua sub fungsi yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan yang kedua adalah pelaksanaan daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut terdahulu secara efektif (Tjokroamidjojo, 1994 : 14).

2. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau program selalu membutuhkan suatu perencanaan. Suatu perencanaan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas dan perencanaan tersebut nantinya akan dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program. Tjokroamidjojo (1985:12) menyebutkan bahwa perencanaan adalah :

- a. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai hasil yang terbaik (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang hendak dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, mengapa dan oleh siapa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan kontinyu dalam rangka mengambil suatu keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Tjokroamidjojo (1974:33) perencanaan pembangunan dipandang dalam konsep administrasi pembangunan yang menyatakan bahwa: "Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses administrasi pembangunan itu sendiri disebut sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam segala aspek kehidupan bangsa".

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu proses pemikiran dan penentuan serta pengarahan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang akan datang.

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat

dan Daerah. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN adalah sebagai berikut: 1) penyusunan rencana, 2) penetapan rencana, 3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara untuk menentukan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan memilih diantara cara-cara alternatif yang efektif, efisien serta rasional.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) menghasilkan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

c. Rencana Pembangunan Tahunan

- 1) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan menurut Aji dan Sirait (1984: 28-29) mengklasifikasikan perencanaan pembagunan berdasarkan segi wilayah. Perencanaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu batas tertentu, hal ini berarti bahwa sumber-sumber diarahkan untuk keperluan daerah itu sendiri. Perencanaan ditinjau dari segi wilayah, yaitu :

a. Perencanaan nasioanal.

Batas wilayah perencanaan ini adalah batas wilayah suatu negara tertentu

b. Perencanaan daerah

Batas wilayah perencanaan ini adalah batas wilayah suatu daerah atau regional yang terdiri dari perencanaan daerah perkotaan dan perencanaan daerah pedesaan.

Selain itu Aji dan Sirait (1984: 29) menjabarkan perencanaan dari segi hirarki atau tingkatan. Perencanaan ini meliputi perencanaan tingkat sektor, tingkat program, dan tingkat proyek. Perencanaan tingkat sektor mencakup sektor-sektor yang ditangani dalam pelaksanaan suatu pembangunan, misalnya sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor-sektor yang lain. Perencanaan-perencanaan ini selanjutnya diperinci menjadi berbagai program dan dijabarkan menjadi proyek-proyek pembangunan.

Sistem perencanaan dalam pembangunan sangat penting dalam mewujudkan suatu pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Perencanaan dianggap sebagai alat pembangunan, karena perencanaan memang memerlukan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun dengan tidak sistematis dan tidak memperhatikan aspirasi target/sasaran, maka pembangunan yang dihasilkan juga tidak seperti yang diharapkan.

4. Program Pembangunan

Suatu rencana operasional tahunan akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan

aplikasi-apiklasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi, kegairahan dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1974: 195). Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri:

- a. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas
 - b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
 - c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek- proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program se-efektif mungkin
 - d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
 - e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri.
 - f. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut
- (Tjokroamidjojo, 1974: 195-196).

5. Pembangunan Perkotaan

Kebijaksanaan pembangunan perkotaan terus berlanjut secara bertahap dan berencana menurut pengembangan wilayah berdasarkan suatu rencana tata ruang yang menyeluruh meliputi pengamatan kota itu sendiri, daerah pedesaan

sekitarnya dan kota-kota yang berdekatan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan urgensinya dikaitkan dengan fungsi hirarkis kota yang bersangkutan sebagai pusat pelayanan berbagai jasa bagi pengembangan wilayah yang dilayaninya. Menurut Ilhami (1988 : 27) secara keseluruhan bentuk-bentuk usaha yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat kota, terutama bagi golongan masyarakat rendah, seperti pembangunan sederhana, fasilitas air bersih dan lain-lain.
- b. Program penyehatan lingkungan pemukiman, seperti sistem saluran air hujan, sistem air buangan, sistem pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pengamanan kota dari kebakaran.
- c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pelimpahan kegiatan pembangunan perkotaan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan kota yang bersifat lokal.
- d. Penyusunan tata ruang dan tata kota, penyusunan kebijakan nasional pertanahan perkotaan.
- e. Pembinaan kegiatan non formal daerah perkotaan melalui kegiatan sektoral maupun program pemerintah daerah sendiri.
- f. Program pendidikan aparatur negara.
- g. Peningkatan status kota.
- h. Peningkatan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan.
- i. Penyusunan rencana perundang-undangan perkotaan.

Pembangunan perkotaan cenderung identik dengan perkembangan wilayah kota yang sangat menekankan pada aspek-aspek fisik saja, seperti pembangunan prasarana dan perluasan wilayah. Perluasan wilayah sesungguhnya merupakan tuntutan terhadap adanya kebutuhan yang semakin meningkat akan prasarana serta pemukiman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perencanaan dan penataan wilayah. Menurut Tjokroamidjojo (1997 : 52) perkembangan wilayah mempunyai dua aspek, yaitu:

- a. Aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dan yang dialami oleh warga.
- b. Aspek yang menyangkut perluasan wilayah.

Pembangunan sarana dan prasarana kota merupakan hal yang mutlak bagi masyarakat kota serta sangat bersifat strategis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hody (1987 : 6) “Pembangunan kota, pembangunan sarana dan prasarana mempunyai kedudukan yang strategis, tentang khususnya pada pembentukan pusat-pusat pembangunan yang mempunyai fungsi penting, baik dalam pembangunan wilayah maupun dalam rangka pembentukan satu kesatuan ekonomi sosial yang dicita-citakan”.

6. Strategi Pembangunan Perkotaan

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan perkotaan di Indonesia khususnya Proses Penyusunan dan Pemilihan Rencana Kota sudah digariskan Progam Bantuan Penyusunan Rencana Kota selanjutnya menurut Ilham (1998 : 90). Kota-kota yang diprioritaskan mendapat Bantuan Penyusunan Rencana Kota adalah:

- a. Kota yang mempunyai kedaulatan atau status Ibukota, Kabupaten dan Kota Administratif.
- b. Kota-kota lain yang mempunyai kedudukan penting sebagai pusat pertumbuhan yang pesat dan pusat pengembangan wilayah maupun kota-kota yang perlu segera diarahkan atau dikendalikan kelestarian lingkungannya.

Pertumbuhan kota ditujukan kearah terciptanya pola Tata Ruang Kota yang sesuai dengan lingkungan hidup perkotaan dan wilayah sekitarnya. Adapun kegiatan pengaturan dan pembinaan pembangunan menurut Ilham (1998 : 85) dilaksanakan melalui progam pokok, antara lain:

- a. Penataan Ruang Wilayah Daerah dan Kota.
- b. Pendidikan Aparatur Pemerintah Kota.
- c. Peningkatan Efisiensi Pemerintah Kota.

Strategi pembangunan perkotaan sangatlah penting, oleh karena itu seharusnya pembangunan kota-kota dilaksanakan sesuai dengan strategi pembangunan wilayah-wilayah dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu terwujudnya satu kesatuan ekonomi yang tangguh.

B. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Bagian terpenting dari suatu kebijakan atau program adalah implementasi dari apa yang tercakup dalam suatu kebijakan atau program tersebut baik sasaran, arah, dan tujuan akhir yang diharapkan. Tanpa implementasi maka kebijakan atau program hanya akan berupa program-program yang tersusun rapi

dan normatif. Lebih lanjut Anderson dalam M. Irfan Islamy (2003 : 19) mengemukakan *Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials* (kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Dalam proses pengimplementasian kebijakan maupun program, ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai kewajiban melaksanakannya, yaitu diantaranya pejabat pemerintah dan rakyat.

Menurut Anderson dalam M. Irfan Islamy (2003 : 66), menjelaskan adanya beberapa faktor yang menyebabkan rakyat mau melaksanakan suatu kebijakan atau program dari pemerintah yaitu antara lain

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan tersebut
- 3) Adanya keyakinan masyarakat
- 4) Adanya kepentingan pribadi
- 5) Adanya sanksi hukum
- 6) Adanya masalah waktu.

Sebagian kebalikan dari faktor-faktor tersebut, Anderson juga menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan, antara lain;

- 1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat
- 2) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum
- 3) Adanya keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok
- 4) Adanya ketidakpastian hukum

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Solichin A.W (2001 : 71), untuk mengimplementasikan kebijakan atau program pemerintah secara sempurna maka diperlukan persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil

- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Didalam melaksanakan suatu kebijakan atau program ini juga memerlukan pemantauan tentang adanya proses ini. Hal ini dapat membantu menilai tingkat kepatuhan dan menemukan akibat-akibat yang diinginkan, serta dapat mengidentifikasi hambatan dan menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan atau program pemerintah.

Konsep dari Daniel A. Mazmian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Solichin A.W. (2001 : 65) lebih tepat dalam menjelaskan implementasi bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Konsep di atas lebih menekankan bahwa semua kejadian atau kegiatan yang ditimbulkan setelah disahkannya suatu kebijakan yang menimbulkan akibat atau dampak baik langsung maupun tidak langsung pada masyarakat dan masyarakat dapat melihat dengan nyata dampak dari kebijakan yang dilaksanakan tersebut. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan atau program itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif.yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan publik, ekonomi, sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi

perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

2. Pengertian Perencanaan

Suatu kota akan selalu berkembang, dan perkembangan ini bisa menuju kearah negatif maupun positif. Untuk mewujudkan perkembangan kota yang positif dan menentukan arah kecenderungan perkembangan diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dengan baik apabila sebuah organisasi menginginkan hasil pelaksanaan pembangunan yang baik pula. Sebagai tahap awal dari keseluruhan proses pembangunan, dengan mengetahui kecenderungan perkembangan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, maka penentuan strategi perencanaan sangat besar artinya bagi langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh sebuah organisasi.

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu definisi yang baku mengenai perencanaan relatif sulit ditetapkan karena adanya pandangan yang berbeda-beda dari para ahli. Namun demikian menurut Soekarwati (1990 : 2) suatu perencanaan dapat disusun berdasarkan kriteria dan beberapa aspek, yaitu:

- a. perlu adanya konsep yang utuh mengenai rencana aktivitas yang akan dilaksanakan.
- b. perlu adanya pertimbangan yang melibatkan aspek keinginan masyarakat dari segala lapisan.
- c. perlu adanya perhatian terhadap potensi sumber daya yang tersedia.

- d. perlu adanya perhatian terhadap tersedianya sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas yang ada berikut sebarannya.
- e. perlu adanya perhatian yang khusus terhadap aspek kontinuitas dan berkesinambungan (*sustainable*).

Berdasarkan argumentasi di atas, kemudian Soekarwati (1990 : 4) mengemukakan bahwa perencanaan sebenarnya merupakan proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Wilson sebagaimana dikutip oleh Jayadinata, perencanaan itu adalah suatu proses yang mengubah proses lain, atau mengubah suatu keadaan buruk untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencana atau orang atau badan yang diwakili oleh perencana itu. Perencana itu meliputi :

- a. analisis, yaitu kepastian data, proyeksi atau ramalan atau perkiraan untuk masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini;
- b. kebijakan (policy), yakni pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan yang meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah alternatif rencana;
- c. rencana/desain, yaitu rumusan atau sajian rencana.(Jayadinata, 1992 : 7)

Karena memerlukan kepastian data, proses perencana itu harus didahului dengan pengumpulan data lewat telaah/survei. Perencanaan menurut Tarigan (2005 : 4) dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan hasil lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses perencanaan dimulai dengan pengamatan mendalam atas struktur fisik, sosial, dan ekonomi daerah tersebut yang mencakup bahan-bahan mengenai

kondisi tanah dan topografi, hidrologi, masalah gempa kalau ada, dan keadaan udara, angin, dan temperature. Faktor-faktor lain : laju pertumbuhan penduduk dan potensinya, kesempatan kerja, kondisi kesehatan dan kesejahteraan, ketersediaan fasilitas dan utilitas, dan sejumlah besar data lain.(Gallion, 1994 : 212).

2.1 Unsur-unsur perencanaan

Dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang lebih tepatnya dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri.

Adapun unsur-unsur itu sendiri meliputi :

- a. adanya unsur-unsur yang diutarakan dengan fakta-fakta.
- b. ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti dan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.
- c. adanya alternatif-alternatif.
- d. alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam penyusunan rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif atau pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. adanya tujuan yang akan dicapai.
- f. dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
- g. bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi proses perencanaan.
- h. adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

(Riyadi dan Bratakusumah, 2003 : 3).

Perencanaan yang baik dan lengkap menurut Syamsi (1986 : 134), adalah mencakup enam unsur pokok :

- a. What (apa), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
- b. Why (mengapa), yakni alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan.
- c. How and How Much (bagaimana dan berapa), yaitu menyangkut cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan dengan dana yang tersedia.

- d. Where (kapan), yakni timing atau pemulihan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- e. Who (siapa), yaitu menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam pelaksana kegiatan (proyek) tersebut. Ini merupakan subyek pelaksana, kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa obyek pelaksana kegiatan (proyek). Dalam hal ini “siapa” disini adalah whom.

Perencanaan tidak lain adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia, yang disusun secara sistematis. Dalam Tjokroamidjojo (1989 : 62-65) disebutkan ada beberapa unsur pokok dari suatu perencanaan yaitu :

- a. kebijaksanaan dasar atau sinergi dasar rencana pembangunan sering yang disebut sebagai tujuan, arah, dan prioritas-prioritas pembangunan juga meliputi sasaran pembangunan.
- b. adanya kerangka rencana.
 - a. Seringkali hal ini disebut juga sebagai kerangka makro rencana. Dalam kerangka ini dihubungkan dengan berbagai variable pembangunan (ekonomi) dan implikasi hubungan tersebut
 - b. Perkiraan unsur-unsur pembangunan merupakan unsur pokok dalam penyusunan rencana pembangunan.
 - c. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
 - d. Berbagai kebijaksanaan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan, dan satu sama lain kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut harus serasi dan konsisten. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut adalah kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan penganggaran, kebiaksanaan harga serta kebijaksanaan berbagai sektor lainnya. Selain itu yang terpenting juga adalah kebijaksanaan pembangunan daerah-daerah.
 - e. Program investasi.
 - f. Program investasi dilakukan secara sektoral, misalnya dibidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Penyusunan program investasi ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan sasaran rencana (development targets).
 - f. Administrasi pembangunan.
 - g. Salah satu segi yang penting dalam perencanaan adalah pelaksanaannya, dan untuk ini diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan penyempurnaan administrasi Negara dan

pembinaan sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan sebagai bagian integral dari rencana pembangunan itu sendiri.

2.2 Tipe-Tipe Perencanaan

Tipe-tipe perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Menurut Glasson (1974) yang dikutip Tarigan (2005, h.14-18), menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah :

1. physical planning and economic planning.
2. allocative and innovative planning.
3. multi or single objective planning.
4. indicative or imperative planning.

Di Indonesia juga dikenal jenis top-down and bottom-up planning, vertical and horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali.

3. Pengertian Tata Ruang

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan menurut Abdul Yuli Andi Gani (1992 : 10) bahwa tata ruang secara harfiah berasal dari kata spatial, yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan. Tegasnya tata ruang berkaitan dengan penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai tempat menyelenggarakan kehidupan.

Penataan ruang menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pada Bab II pasal 2 berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;

- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Dengan adanya asas di atas diharapkan penataan ruang dapat berjalan sesuai dengan jalur hukum yang ada dan tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang akan membawa bencana.

Terdapat tujuan dari penataan ruang menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah, mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari uraian di atas penataan ruang dapat diartikan sebagai usaha pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah secara terpadu dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal. Akan tetapi dalam penataan ruang, kita masih dihadapkan beberapa kendala yang kompleks. Kendala yang ada haruslah dapat dijadikan sebuah tantangan untuk terus

melaksanakan usaha penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan sumber daya. Sehingga tantangan yang dihadapi dapat dijawab dengan suatu hal yang berdampak baik bagi masyarakat.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

4.1 Pengertian RTRW

Perencanaan tata ruang (*spatial planning*) merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional seperti Uni Eropa.

Salah satu definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional/Spatial Planning Charter (disebut juga Torremolinos Charter), yang diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), yang berbunyi:

"Perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama".

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya

pengembangan wilayah, juga Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.

Selanjutnya Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan ruang wilayah adalah penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang penggunaannya ditaur dengan tegas penggunaannya (jelas peruntukaanya) dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya. Dengan demikian, kegiatan itu disebut perencanaanya/penyusunannya tata ruang wilayah (Tarigan, 2005 : 49).

Selanjutnya Tarigan (2005 : 50) mengemukakan bahwa “perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya pada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan”.

Dengan demikian perencanaan penataan ruang wilayah harus memperhatikan segala aspek kehidupan guna mewujudkan suatu tata ruang yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Pada rencana tata ruang wilayah kota, kegiatan utama adalah perkotaan dan permukiman sehingga menjadi fokus perhatian adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. Tarigan (2005 : 50)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak guna penetapan dan pengaturan penggunaan ruangan atau bagian-bagian wilayah sehingga dapat menciptakan kemakmuran dan kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Saat ini telah dikeluarkan UU Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 yang menggantikan UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang memuat beberapa perubahan penting, dimana salah satunya adalah rentang waktu pelaksanaan sebuah produk rencana tata ruang yang diperpanjang hingga 20 tahun. UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang merupakan landasan penataan ruang wilayah di Indonesia menyebutkan bahwa rencana tata ruang dibedakan atas :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

RTRW nasional merupakan penjabaran secara keruangan arah pembangunan Nasional jangka panjang nasioanal dan jangka menengah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional juga merupakan kebijakan pemerintah yang

menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional beserta kriteria dan pola penanganan kawasan yang dilindungi, kawasan budidaya dan kawasan lainnya.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

RTRW provinsi merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional kedalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan jangka waktu pelaksanaannya 20 tahun. Kebijaksanaan itu meliputi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perijinan, arahan insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

RTRW kabupaten merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah, serta pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pada RTRW kota memuat, (a) rencana panyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; (b) rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau, dan (c) rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Tarigan (2005 : 58) mengungkapkan bahwa setiap rencana tata ruang kabupaten/kota harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa:

- a. tujuan pemanfaatan ruang,
- b. struktur dan pola pemanfaatan ruang,
- c. pola pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2 Fungsi dan Tujuan RTRW

Mengenai fungsi RTRW, Sujarto (2003 : 28) mengungkapkan bahwa secara fungsional RTRW kota merupakan :

- a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota.
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kota serta keserasian antar sektor.
- c. pengarah lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- d. pemanfaatan ruang bagian wilayah kota bagi kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, Sujarto (2003 : 48) juga mengungkapkan bahwa “rencana tata ruang wilayah kota berorientasi pada suatu kegiatan untuk menjadi pengarah, pengatur, dan pengendali di dalam mengakomodasikan perkembangan spasial sebagai implikasi dari dinamika perkembangan kota secara optimal”.

Sehubungan dengan fungsi diatas, maksud dan tujuan rencana tata ruang wilayah kota adalah penggambaran secara garis besar kerangka kebijaksanaan perencanaan tata ruang yang dinamis serta berisi rumusan pokok kebijaksanaan perencanaan tata ruang pada bagian wilayah-wilayah kota, serta untuk penyusunan rencana-rencana yang lebih detail didalam rencana peruntukan lahan, rencana sektor-sektor, maupun rencana tata ruang wilayah kota yang terperinci.(Sujarto, 2003 : 28)

C. Pengembangan Wilayah

1. Pengertian Pengembangan

Menurut Jayadinata (1992 : 2) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Menurut kutipan Emil Salim, pengembangan adalah persiapan program pembangunan secara teknis dan non teknis yang termasuk didalamnya adalah rumusan kebijakan pemanfaatan maka wilayah pemukiman yang meliputi ruang di atas dan di bawahnya yang diatur oleh Perda ataupun oleh pemerintah untuk pusat bagi pengembangan pembangunan suatu kawasan urban.

Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu proses memajukan, meningkatkan, dan memperbaiki segala sesuatu yang telah ada serta juga mengadakan sesuatu agar mencapai tingkat yang lebih baik.

2. Teori Pengembangan Kota

Dalam merencanakan pengembangan kota harus lihat terlebih dulu struktur kota. Terdapat tiga teori mengenai struktur perkotaan dalam buku Budi D. Sinulingga(1999 : 25), yaitu:

a. Concentric Zone Theory Dari Burgess

Dikemukakan bahwa kota-kota itu memekarkan diri bermula dari pusat aslinya, sehingga dengan datangnya tambahan penduduk nantinya secara bertahap meluas ke wilayah-wilayah tepi dan keluar, memberikan struktur bergelang mengikuti aliran air. Suatu urban area terdiri dari beberapa cocentric zone (daerah lingkaran). Masing-masing zone mewujudkan suatu natural area khusus yang letaknya melingkari yang lain dari dalam atau dari luar. Masing-masing zone memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

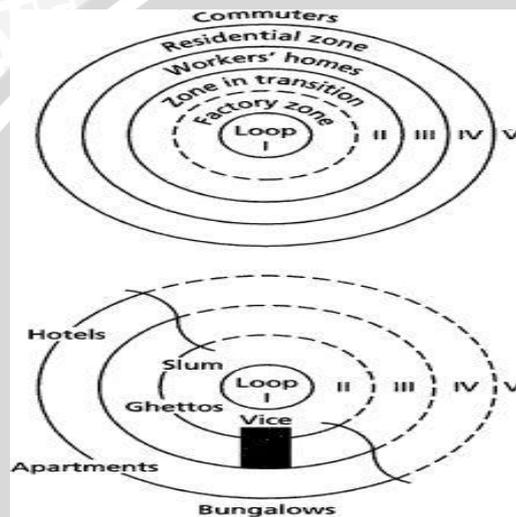
Zone I : The Loop, merupakan pusat perdagangan dan keuangan, dengan harga tanah tertinggi dibandingkan zone yang lain.

Zone II : Zone In Transition, kawasan peralihan berisi industri, di sela perumahan penduduk masa lampau.

Zone III : The Zone of Working men's Homes, merupakan zone kaum buruh, mereka menetap disitu kadang-kadang untuk selamanya. Pada zone ini sarana komunikasi dan transportasi relatif kurang.

Zone IV : The Residential Zone, merupakan zone untuk kaum kelas menengah. Terdapat gedung-gedung apartemen high class maupun rumah-rumah tempat tinggal orang kaya.

Zone V : The Commuters Zone, merupakan daerah di luar batas kota. Mereka yang berdiam disana bekerja di kota dengan melaju karena umumnya mereka memiliki kendaraan sendiri.



Gambar 1. CONCENTRIC ZONE THEORY DARI BURGESS

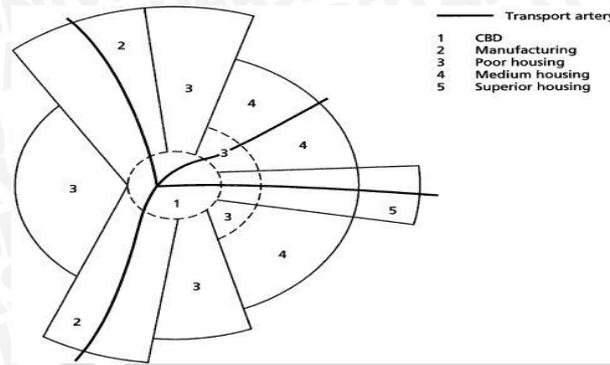
Sumber: <http://www.answers.com>

b. Sector Zone Theory (Homer Hoyt)

Dikemukakan bahwa proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan sektor-sektor. Hoyt berpendapat bahwa pengelompokan tata guna tanah menjulur seperti irisan kue tart. Pada teori ini terjadi perbedaan kawasan kota berdasarkan jenis pergedungan maupun kelompok penduduk tanpa keterangan latar belakang terjadinya.

Oleh para ahli dihubungkan dengan latar belakang geografi alam dari kota-kota yang bersangkutan serta rute-rute transportasi. Tanah yang datar memungkinkan pembuatan jaringan jalan, rel kereta api, dan terusan yang murah. Akibatnya, sebuah kota perindustrian cenderung untuk mekar dengan cara memanjang. Dengan demikian pula lokasi kota di tepi pelerengan, cenderung mekar melengkung mengikuti bujurian lereng tersebut, ini menyangkut perumahan penduduk.

Semakin ke dalam kota, bangunan gedung atau perumahan makin kuno, dan fungsi industri-industri makin berkurang. Sebaliknya, perindustrian makin berkembang pesat dipinggirkan kota yang lebar sektornya dan memang membesar.



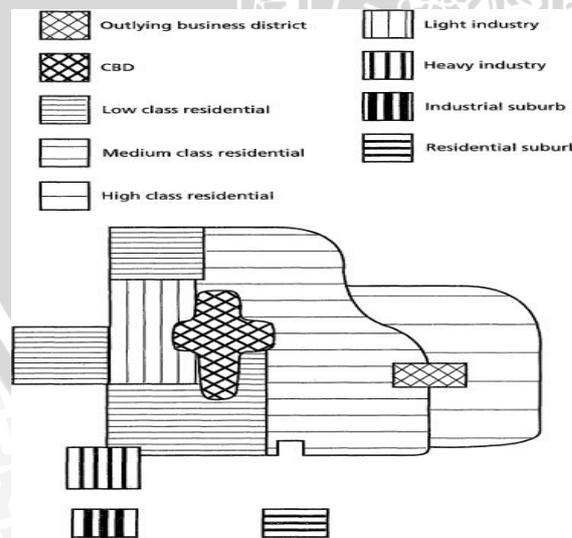
Gambar 2. SECTOR ZONE THEORY (HOMER HOYT)

Sumber: <http://www.answers.com>

c. Multiple Nuclei Theory (Harris Dan Ullman)

Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan kota yang bermula dari suatu pusat menjadi ruwet bentuknya. Hal ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Dikelilingi nukleus-nukleus baru itu akan mengelompok tata guna tanah yang bersambungan secara fungsional. Keadaan ini akan melahirkan struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan.

Tempat-tempat yang bertipe nukleus misalnya bandara, kompleks industri, kampus universitas, pelabuhan atau stasiun besar. Kemudian terjadi pengelompokan tata guna tanah dengan perhitungan keuntungan ekonomis. Misalnya, industri mencari lokasi dekat dengan pusat perbelanjaan



Gambar 3. MULTIPLE NUCLEI THEORY (HARRIS DAN ULLMAN)

Sumber: <http://www.answers.com>



Meskipun masing-masing teori tidak dapat diterapkan sepenuhnya secara nyata, teori-teori tersebut sangat berguna sebagai tuntunan untuk memahami seluk-beluk pola tata guna tanah dalam kota pada umumnya. Suatu kota seringkali memuat unsur-unsur tertentu dari teori itu, sehingga strukturnya merupakan kombinasi dari beberapa teori. Umumnya kota-kota kecil strukturnya mengikuti pola kombinasi dari Burgess dan Hoyt. Sedangkan kota-kota besar mengikuti Nuclei. Meskipun dalam suatu kota beberapa pola dapat bercampur secara khusus, nantinya akan memberikan corak yang khas bagi suatu kota.

2.1 Pengertian Kota

Terdapat berbagai pengertian dan pendapat dari para ahli mengenai kota, dan beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. R. Bintarto (1983 : 36) memandang kota terutama dari segi geografi, sehingga batasan pengertian tentang kota:

...Kota dapat dialihkan sebagai suatu sistem jaringan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis atau dapat pula diartikan sebagai suatu bertangan budaya yang ditimbulkan oleh unsure alami dan cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

- b. Definisi klasik dari Amos Rappoport

Suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.

- c. S. Pamudji (1980) mendefinisikan kota sebagai “sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu, hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, ekonomi, dan individualis.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara definisi satu dengan yang lain dan para ahli diatas memang pendefinisian ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Namun dari beberapa definisi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan akan unsur-unsur kota, antara lain:

1. adanya luas demografi tertentu yang dibangun serta ditata, sehingga menampakkan keteraturan,
2. terdapat gerak kehidupan sosial ekonomi penduduk yang heterogen,
3. adanya pola hubungan masyarakat yang lebih rasional dan individualis.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa kota merupakan wilayah geografis tempat tinggal kelompok manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen, cenderung non agraris dan berpola hubungan rasional serta individualis.

Dalam karya tulis ini pengertian ruang lingkup kota sebagai wilayah pengembangan adalah wilayah administrasi Kabupaten Jombang, khususnya daerah yang saat ini sedang dalam pembangunan infrastruktur.

2.2 Ciri-ciri Umum Kota

Dalam ciri-ciri kota secara umum disebutkan menjadi beberapa ciri-ciri fisik. Berikut penjabaran dari ciri-ciri kota:

1. Ciri-ciri fisik kota menurut Bintarto (1983)
 - a) adanya tempat pasar dan pertokoan
pasar dan petokoan selalu merupakan titik pusat keramaian di suatu kota karena perkembangan di bidang industri, pertanian, dan jasa yang kesemua bidang tersebut membutuhkan sarana akumulasi distribusi. Kebutuhan ini hanya secara umum dapat dilayani dikota.

- b) Adanya tempat untuk parkir
Pusat-pusat kegiatan kota yang dinamis karena adanya unsur kebutuhan sarana jalan dan angkutan pada akhirnya memerlukan tempat parkir secara khusus.
- c) Adanya tempat untuk rekreasi dan olah raga
Di kota banyak tersedia fasilitas rekreasi dan olah raga yang lebih lengkap dan terpelihara daripada wilayah belakangnya.
- d) Adanya bangunan-bangunan sehubungan dengan fungsi kota sebagai pusat bermacam-macam kegiatan.

3. Fungsi kota

Menurut Ilham (1990 : 13), dalam mengadakan pendekatan terhadap fungsi kota terdapat beberapa perbedaan, yaitu: “Fungsi dan peranan kota pada hakikatnya ditentukan oleh keadaan geografis dan potensi daerah sekelilingnya. Dengan adanya potensi tertentu yang berkembang menonjol, maka bentuk kota dengan ciri atau fungsi tertentu, misalnya sebagai pusat pendidikan, kota pariwisata dan sebagainya”.

Oleh karena itu fungsi dan peranan dari tiap-tiap kota akan berbeda baik dalam proses maupun perkembangannya. Dengan meningkatnya peranan kota maka fungsi kota tersebut juga mempunyai kecenderungan terus mengalami perkembangan fisik ekonomi kota itu sendiri.

Adapun beberapa pengertian tentang fungsi kota yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara universal antara lain:

- a. Kota sebagai Pusat Pemerintahan.

Yaitu kota sebagai pusat penyelenggaraan, pengemban tugas Negara dalam melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat. Melayani dapat juga dapat dikatakan sebagai tugas dari pemerintah kota yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat kota dan sekitarnya. Sehingga dapat

dikatakan bahwa kota dapat berfungsi sebagai tempat atau sumber dari seluruh kegiatan pemerintah, dan dikaitkan dengan daerah sekitarnya.

b. Kota sebagai Pusat Perekonomian.

Sesuai dengan corak kehidupan yang heterogen, maka dengan jumlah penduduk yang begitu besar diperlukan berbagai macam fasilitas perdagangan, sarana dan prasarana perhubungan, bidang jasa, dan lain-lain. Sebagian besar fasilitas tersebut terdapat di kota sebagai titik pertumbuhan lalu lintas ekonomi. Tempat terspusatnya kegiatan sektor industri dan perdagangan serta kegiatan non agraris lainnya. Demikian pula dalam kegiatan peredaran uang dapat diketahui bahwa di kota lebih cepat dari pada di desa karena sifat masyarakatnya yang dinamis.

c. Kota sebagai Pusat Kebudayaan.

Kebudayaan yang dimaksud adalah segenap segi kehidupan yang beraneka ragam yang ditujukan untuk memenuhi rasa/hasratnya serta untuk mencapai kebutuhannya. Dalam hal ini termasuk pula bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, seni dan karya lainnya. Di kota, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat cepat karena ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yaitu dengan adanya berbagai macam lembaga pendidikan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

Demikian pula dalam bidang seni, kota juga menyediakan berbagai fasilitas pendukungnya.

d. Kota sebagai Pusat Pemukiman.

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang berjalan cukup cepat, maka perkembangan kota-kota di Indonesia juga bergerak mengikuti lajunya pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu diperlukan rumah sebagai tempat tinggal dengan beragam tipe mulai dari tingkat yang paling bawah sampai dengan kelas elit/mewah. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga akan membawa konsekuensi dan tantangan yang sangat besar bagi pemerintah kota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006 : 72 dalam jurnal Ardhana). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipakai untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif, atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1989 : 12) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan dalam penelitian ini untuk membatasi rincian pernyataan tentang cakupan topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
 - a. Pembagian wilayah pembangunan
 - b. Sistem dan Fungsi Perwilayahan
 - c. Strategi Pengembangan Daerah
2. Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Upaya Pengembangan Pembangunan Daerah
 - a. Pemanfaatan Lahan
 - b. Penataan Prasarana dan Penyediaan Fasilitas Umum
 - c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk
3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Tata Ruang Wilayah Sebagai Upaya Pengembangan Pembangunan Daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah ruang atau tempat dimana penelitian dilaksanakan. Adapun lokasi yang diteliti adalah wilayah Kabupaten Jombang yang menjadi wilayah pengembangan pembangunan. Lokasi penelitian

juga sesuai dengan RTRW kabupaten Jombang yang bersiap mengembangkan wilayahnya sebagai sentra agribisnis yang berbasis pada potensi lokal.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Menurut Strauss yang dikutip oleh Ismani H.P (1991 : 50-51) secara umum penelitian situs ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interaksi dan sebagainya, yang sesuai dengan ketentuan deskripsi mendalam.
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dalam penelitian ini, yang dipilih menjadi situs penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Jombang, dimana yang bertindak sebagai implementatornya Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

D. Sumber Data

Setiap peneliti agar mempunyai hasil yang baik sesuai dengan yang dikehendaki tentunya harus ditunjang oleh data-data yang relevan, baik jumlah maupun jenis data yang diperlukan. Sedangkan data-data tersebut harus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, sedangkan jenis data adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu dari :

- a. Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang
- b. BAPPEDA Kabupaten Jombang

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Data ini dapat berupa dokumen resmi, majalah, dan publikasi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipilih dan digunakan dalam proses pengumpulan data tergantung pada sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung pada subyek atau obyek penelitian, dimana dengan cara ini diharapkan diperoleh data subyektif.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat dan mengamati keadaan lokasi penelitian dan selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Wawancara

Peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan para informan untuk menggali data secara langsung, dengan komunikatif dan dialogis sehingga dari wawancara tersebut diperoleh suatu data dengan akurasi yang tinggi.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber data yang ada pada lokasi, misalnya dalam bentuk tabel, daftar, dan sebagainya. Dokumentasi diperoleh dari arsip Pemerintah Kabupaten Jombang terutama dari Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan serta BAPPEDA Kabupaten Jombang.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Agar data mengenai variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa didapatkan, maka penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut :

1. Peneliti, sebagai instrumen kunci dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian. Hal ini berguna untuk

mengarahkan peneliti dalam pencarian data pada saat wawancara dilakukan.

3. Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif, maka setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Dalam bukunya Miles dan Huberman (1992 : 16) menyatakan bahwa analisis data yang terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan analisis data kualitatif menggunakan alur kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu semua data yang terkumpul dari hasil studi interview, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini data

yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan ini akan direduksi, dirangkum, dan di seleksi hal-hal pokok, kemudian difokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian yang berlangsung.

3. Penyajian data merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
4. Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data yang diperoleh. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kabupaten Jombang

Jombang termasuk Kabupaten yang masih muda usia, setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu : Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. Menurut sejarah lama, konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian Barat, sedang letak gapura sebelah selatan di desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi). Salah Satu Peninggalan Sejarah di Kabupaten Jombang Candi Ngrimbi, Pulosari Bareng Bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu onderdistrict afdeeling Jombang) pada tahun 1880.

Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi onderdistrict afdeeling Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah dikelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700. Konon disebutkan dalam ceritera rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang.

2. Kondisi Wilayah Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Selain daripada itu Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis karena dilewati jalur jalan arteri primer/ poros Yogyakarta – Solo – Surabaya. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya. Luas

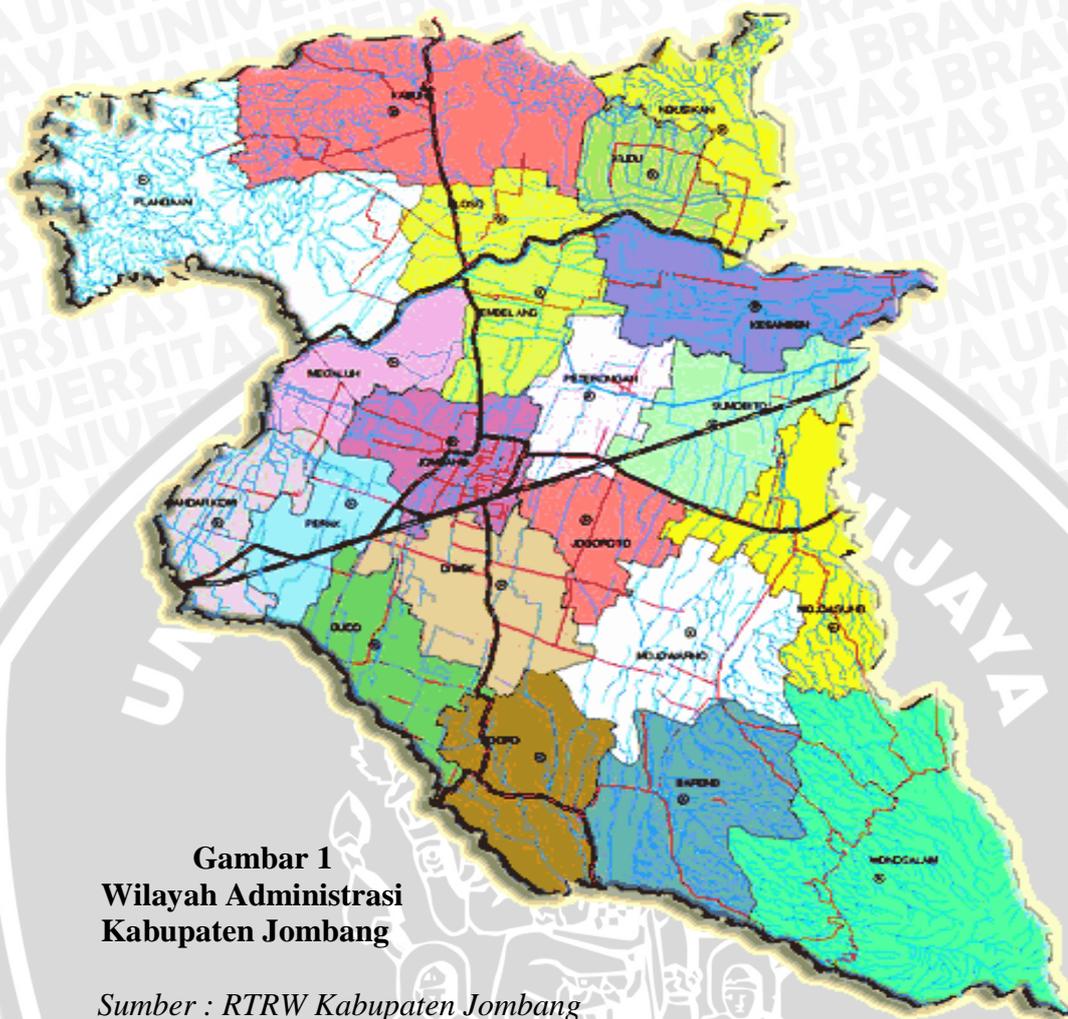
wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 Km², terdiri dari 21 Kecamatan dan 307 desa dan 2,46% dari luas Propinsi Jawa – Timur, dimana 52,08% atau sekitar 603,93 Km² berupa lahan persawahan. Kecamatan Ngusikan merupakan kecamatan baru, yaitu merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2000.

Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian \pm 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian $>$ 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Letak geografis Kabupaten Jombang terletak antara 5^o20' 01'' – 5^o 30' 01'' Bujur Timur dan antara 7^o 24' 01'' – 7^o45' 01'' Lintang Selatan. Kabupaten Jombang berbatasan dengan batas administratif wilayah – wilayah berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Jombang secara administratif terdiri atas 21 Kecamatan, dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 306. Kedudukan lingkup wilayah administratif

Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Wilayah Administrasi
Kabupaten Jombang

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang

Kedudukan Wilayah Kabupaten Jombang dan Lingkup wilayah administratif Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Bandar Kedung Mulyo	32,50	11	42
2	Perak	29,05	13	36
3	Gudo	34,39	18	75
4	Diwek	47,70	20	100
5	Ngoro	49,86	13	82
6	Mojowarno	78,62	19	68
7	Bareng	94,27	13	50
8	Wonosalam	121,63	9	48
9	Mojoagung	60,18	18	60
10	Sumobito	47,64	21	76
11	Jogoroto	28,28	11	46
12	Peterongan	29,47	14	56
13	Jombang	36,40	20	72
14	Megaluh	28,41	13	41
15	Tembelang	32,94	15	65
16	Kesamben	51,72	14	61
17	Kudu	77,75	11	47
18	Ngusikan	34,98	11	39
19	Ploso	25,96	13	50
20	Kabuh	97,35	16	87
21	Plandaan	120,40	13	57
Jumlah		1.159,50	306	1.258

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 – Tahun 2029

Dari data tabel di atas maka dapat diketahui mengenai luas, jumlah desa, dan jumlah dusun pada setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang.

2.1 Kondisi Fisik Dasar

a. Kemampuan Lahan

1. Kemiringan/Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan wilayah datar hingga bergelombang. Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak Kecamatan Gudo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jogoroto,

Kecamatan Peterongan, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Ploso berada pada kemiringan lahan 0 – 2 %.

Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Jombang berada pada kemiringan 0 – 5 %. Kecamatan Kecamatan Kabuh berada pada kemiringan 0 – 40 %. Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Plandaan merupakan kecamatan yang mempunyai kemiringan bervariasi dari datar hingga terjal 0 - > 40 %. Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan berada pada kategori bergelombang hingga terjal. Lihat Tabel 2.

Tabel 2
Kondisi Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Jombang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)			
		0 - 2 %	2 - 5 %	15 - 40 %	> 40 %
1	Bandar KedungMulyo	4.360,0	0	0	0
2	Perak	2.890,0	0	0	0
3	Gudo	4.300,0	0	0	0
4	Diwek	5.500,0	0	0	0
5	Ngoro	4.637,0	0	0	0
6	Mojowarno	6.425,0	525,0	0	0
7	Bareng	3.700,0	1.475,0	225,0	175,0
8	Wonosalam	0	4.421,4	1.350,0	125,0
9	Mojoagung	4.550,0	225,0	3.950,0	6.628,6
10	Sumobito	4.763,0	0	125,0	150,0
11	Jogoroto	2.660,0	0	0	0
12	Peterongan	2.890,0	0	0	0
13	Jombang	3.975,0	125,0	0	0
14	Megaluh	4.540,0	0	0	0
15	Tembelang	3.310,0	0	0	0
16	Kesamben	7.500,0	0	0	0
17	Kudu	0	1.200,0	225,0	0
18	Ngusikan	0	300,0	75,0	525,0
19	Ploso	2.250,0	0	0	0
20	Kabuh	3.200,0	6.125,0	225,0	0
21	Plandaan	3.825,0	6.725,0	850,0	150,0
Jumlah		75.275,0	21.121,4	7.025,0	7.753,6

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 – Tahun 2029

Dari data tabel, maka dapat diketahui kondisi kemiringan lahan pada setiap Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang.

2. Ketinggian

Sesuai dengan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar terdiri dari tanah datar yaitu berada pada ketinggian rata-rata kurang dari 500 m, kecuali ada 5 desa dengan ketinggian 500-700 m dan 1 desa pada ketinggian 700 m yang terletak di Kecamatan Wonosalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

3. Kedalaman Efektif Tanah

Dilihat dari penyebarannya kelas efektif tanah di kabupaten Jombang sebagian besar mempunyai lahan dengan kedalaman efektif tanah dominan lebih dari 90 cm hal ini dapat diartikan pada sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Jombang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam arti kata akar tanaman dapat menembus kedalaman tanah dimana akar tanaman tersebut dapat serta mampu menyerap air dibandingkan dengan tingkat kedalaman efektif tanah yang berada dibawah angka 90 cm. Komposisi luas lahan berdasarkan kedalaman efektif tanah di Kab. Jombang terdiri atas 4 kelas :

- a. Lebih dari 90 cm seluas 95.129,930 Ha
- b. Antara 61 - 90 cm seluas 6.770,817 Ha
- c. Antara 30 - 60 cm seluas 2.706,999 Ha
- d. Kurang dari 30 cm seluas 11.340,254 Ha

4. Tekstur Tanah

Dilihat dari penyebaran jenis tekstur tanah di Kabupaten Jombang terdiri atas 3 kelas lahan :

- a. Jenis tekstur halus 61.569,676 Ha
- b. Jenis tekstur sedang 31.536,683 Ha
- c. Jenis tekstur halus 2.843,439 Ha

Dengan melihat proporsi jenis tekstur tanah diatas dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Jombang mempunyai dominasi tekstur tanah halus dengan sifat jenis tanah yang mudah mengikat air serta partikel-partikel lainnya yang sangat berguna bagi jenis-jenis tanaman yang tumbuh dan dibudidayakan di Kabupaten Jombang.

5. Erosi

Seperti yang telah dijabarkan pada point bahasan jenis tanah bahwa terdapat beberapa kawasan yang mempunyai potensi pada terjadinya peristiwa erosi, keadaan ini bisa terjadi karena faktor manusia dengan kata lain masyarakat yang ada di kawasan ini mengeksploitasi lahannya kurang mempertimbangkan sisi pengamanannya selain itu pula didukung oleh jenis tanah yang mempunyai sifat tidak saling mengikat dan terjadi karena bahan lapukan ikatannya tidak kuat ditunjang dengan kondisi topografi yang curam sehingga mudah terjadi erosi. Kawasan yang mempunyai kecenderungan erosi pada kawasan selatan dan utara yang mempunyai ciri lahan pegunungan/perbukitan.

6. Drainase

Aspek drainase di Kabupaten Jombang relatif baik hal ini ditunjang dengan ciri lahan yang telah dijabarkan sebelum ini, kecuali pada kawasan perkotaan yang mempunyai lahan rata-rata serta ditunjang dengan terdapatnya sebagian sistem drainase yang belum sempurna mengakibatkan terdapatnya genangan sesaat.

b. Geologi

Kabupaten Jombang memiliki struktur geologi yang bervariasi, masing-masing jenis keadaan struktur geologi dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yaitu plitosen fasies gunung api, plitosen fasies sedimen, alluvium fasies gunung api, plitosen fasies sediemen, hasil gunung api kwarter tua, hasil gunung api kwarter muda dan alluvium. Adapun struktur geologi dengan luas terbesar yaitu alluvium dengan luas 52.792,82 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Luas Daerah Menurut Struktur Geologi Kabupaten Jombang

No.	Struktur Geologi	Luas (Ha)
1	Pleistosen Fasies Gunung Api	1.328,94
2	Pliosen Fasies Sedimen	6.826,09
3	Alluvium Fasies Gunung Api	650,16
4	Pleistosen Fasies Sedimen	6.411,20
5	Alluvium	52.792,82
6	Hasil Gunung Api Kwarter Muda	17.096,12
7	Hasil Gunung Api Kwarter Tua	24.120,61
Jumlah		109.225,94

Sumber: Rencana Teknik Lapang Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah

Kabupaten Jombang

Dari data tabel di atas dapat diketahui tentang luas daerah menurut struktur geologi pada setiap wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan ciri fisik tanah yang ada di Kabupaten Jombang dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kabupaten Jombang bagian utara adalah bagian dari pegunungan kapur yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiografi yang mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit tetapi tidak terlalu tajam, yang terletak di sebelah utara sungai Brantas.
2. Kabupaten Jombang bagian tengah di bagian selatan sungai Brantas sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan sungai-sungai dan daerah irigasi yang tersebar dan cocok untuk pertanian.
3. Kabupaten Jombang bagian selatan merupakan tanah pegunungan yang dimanfaatkan untuk daerah perkebunan.

c. Klimatologi

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan.

Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20°C – 32°C .

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Rata-rata Curah Hujan Per Bulan Kabupaten Jombang

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)
1	Januari	216
2	Februari	179
3	Maret	227
4	April	195
5	Mei	96
6	Juni	29
7	Juli	20,1
8	Agustus	26
9	September	54
10	Oktober	129
11	November	269
12	Desember	242
	Jumlah	1.662,00

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2007 – 2027

Dari data tabel di atas dapat diketahui tentang rata-rata curah hujan per bulan di Kabupaten Jombang. Iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan, hal ini juga dipahami di Kabupaten jombang.

d. Hidrologi

Kabupaten Jombang memiliki beberapa aliran sungai, yang melintas dan beberapa waduk. Sungai-sungai yang melintasi wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. Sungai Brantas yang melintas di sebelah barat dan utara yang membatasi wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk.
2. Kali Slumbung Kuning yang bermata air di Kecamatan Wonosalam.
3. Kali Gondan yang bermata air di Kecamatan Wonosalam.
4. Sungai-sungai lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Debit air antara musim hujan dan musim kemarau pada beberapa sungai menunjukkan perbandingan yang cukup ekstrim. Salah satunya adalah Sungai Kaligunting yang memiliki perbandingan debit 43 : 1. Perbedaan yang sangat menonjol (fluktuatif) ini berpotensi menimbulkan bencana banjir. Selanjutnya salah satu komponen yang memberi pengaruh besar terhadap kondisi hidrologi adalah sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub DAS. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang masuk dalam DAS Brantas yang merupakan sungai utama yang mempengaruhi ekosistem wilayah tersebut. Selain sungai di wilayah perencanaan juga terdapat 14 buah waduk sebagai satu kesatuan sistem dalam hidrologi wilayah yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Nama, Luas dan Kemampuan Waduk Mengairi Sawah
Di Kabupaten Jombang

No.	Nama Waduk / Embung	Luas Waduk (Ha)	Volume (M ³)	Luas Sawah (Ha)
1	Kepuhrejo	2,00	30.000	73
2	Grogol	1,93	28.950	99
3	Mangunan	5,00	85.000	118
4	Kradenan	1,50	9.000	60
5	Brumbung	1,50	18.000	42
6	Sempal	1,50	22.500	61
7	Karangjati	1,10	16.500	49
8	Karangpakis	1,50	9.800	32
9	Ngabar	0,85	10.200	93
10	Tanjung Wadung	1,25	20.000	97
11	Bangsri	3,05	39.650	65
12	Plabuhan	3,48	73.080	52
13	Sidowayah	1,00	15.000	273
14	Glugu	0,48	5.760	8

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 - Tahun 2029

Dari data tabel di atas dapat diketahui tentang nama, luas dan kemampuan waduk mengairi sawah di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki wilayah

persawahan yang luas, maka pengairan sangat diperlukan di wilayah Kabupaten Jombang.

Dalam sistem hidrologi, kondisi ketinggian dan kemiringan lahan mempengaruhi karakter aliran air permukaan, yang dapat dilihat pada Gambar 5.4. Selain aliran air permukaan, di Kabupaten Jombang juga terdapat aliran air bawah tanah atau air tanah. Dimana sumberdaya air bawah tanah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alternatif sumber air baku. Adapun pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Jombang digunakan untuk domestik, pertanian, komersil, dan industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.



Tabel 6
Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Tanah Di Kabupaten Jombang

No.	Kecamatan	Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Tanah (m ³ /Tahun)				Jumlah (m ³ /Tahun)
		Domestik	Pertanian	Komersil	Industri	
1	Bandar Kedung Mulyo	1.311.547	0	2.796	0	1.314.343
2	Perak	1.389.658	0	5.616	27.996	1.423.270
3	Gudo	1.596.478	1.200	2.760	0	1.600.438
4	Diwek	2.435.796	362.976	47.208	103.728	2.949.708
5	Ngoro	1.941.385	3.108	19.944	27.996	1.992.433
6	Mojowarno	2.320.378	0	26.436	27.996	2.374.810
7	Bareng	1.430.538	1.596	1.380	0	1.433.514
8	Wonosalam	888.673	0	12.960	0	901.633
9	Mojoagung	1.634.658	3.000	29.868	0	1.667.526
10	Sumobito	2.228.505	0	6.216	0	2.234.721
11	Jogoroto	1.617.466	0	0	0	1.617.466
12	Peterongan	1.679.873	3.060	43.464	104.388	1.830.785
13	Jombang	4.823.402	334.176	200.556	464.988	5.823.122
14	Megaluh	1.075.524	0	1.092	27.996	1.104.612
15	Tembelang	1.441.575	0	0	27.996	1.469.571
16	Kesamben	1.763.418	0	0	0	1.763.418
17	Kudu	1.447.182	0	0	0	1.447.182
18	Ngusikan	0	0	0	0	0
19	Ploso	1.318.855	4.176	8.988	937.632	2.269.651
20	Kabuh	1.107.878	0	0	0	1.107.878
21	Plandaan	1.077.042	0	0	27.996	1.105.038
Jumlah		34.529.831	713.292	409.284	1.778.712	37.431.119

Sumber : Laporan Akhir Studi Potensi Sumberdaya Air Bawah Tanah Kabupaten Jombang

Dari data tabel di atas dapat diketahui tentang pemanfaatan air bawah tanah dan air tanah di Kabupaten Jombang. Dimana sumberdaya air bawah tanah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alternatif sumber air baku di wilayah Kabupaten Jombang.

2.2 Aspek Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

a. Kependudukan

Peninjauan aspek kependudukan dalam konteks tata ruang wilayah meliputi beberapa aspek, antara lain jumlah dan perkembangan penduduk per kawasan, tingkat kepadatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Karakter kependudukan ini penting sebagai salah satu dasar dalam pembahasan substansi tata ruang wilayah, antara lain : untuk memperkirakan perkembangan wilayah dan kecenderungan kebutuhan ruang dan infrastruktur wilayah, penentuan tingkat kesejahteraan, interaksi antar wilayah dan lain sebagainya. Untuk itu, aspek-aspek kependudukan mendasar yang perlu diidentifikasi meliputi jumlah dan tren perkembangan penduduk, kepadatan, tingkat kesejahteraan, ketenagakerjaan, pendidikan, pendapatan perkapita dan beberapa aspek lain yang mendukung.

1. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Registrasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang akhir tahun 2008 sebesar 1.340.229 jiwa. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 147.634 jiwa atau 10,22 persen dari total penduduk Kabupaten Jombang.. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jombang sebagai Ibukota Kabupaten dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalan, Kabuh, Plandaan dan Ngusikan. Perkembangan penduduk di Kabupaten Jombang selama 6 tahun terakhir mengalami pertumbuhan, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2008 sebesar 2,8%. Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah penduduk di wilayah perencanaan selama enam tahun terakhir dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan 2003-2008

Kecamatan	2003	2004	2005	2006	2007	2008)*
010. Bandar KedunMulyo	45.223	45.272	45.468	45.545	45.773	49.924
020. Perak	48.695	48.989	49.353	49.373	49.425	58.362
030. Gudo	52.728	52.830	52.916	52.984	53.177	59.092
040. Diwek	91.250	91.559	92.174	92.395	92.883	113.634
050. Ngoro	65.375	65.587	65.581	65.894	68.039	81.271
060. Mojowarno	80.908	81.320	81.399	81.300	81.400	93.962
070. Bareng	49.743	50.114	50.681	50.956	51.097	57.248
080. Wonosalam	30.561	31.026	31.239	31.242	31.299	35.411
090. Mojoagung	70.752	71.328	71.126	71.507	72.178	76.294
100. Sumobito	74.007	74.578	74.472	74.490	74.856	84.762
110. Jogoroto	53.840	53.871	53.893	53.997	56.086	66.583
120. Peterongan	56.953	57.350	57.067	57.174	57.136	68.671
130. Jombang	118.156	118.752	118.666	118.456	118.204	147.634
140. Megaluh	37.195	37.796	37.955	38.006	38.046	42.433
150. Tembelang	50.390	50.794	51.555	51.670	51.651	55.412
160. Kesamben	61.361	61.425	61.357	61.605	61.784	71.132
170. Kudus	29.696	29.718	29.843	29.950	31.168	31.787
171. Ngusikan	21.116	21.162	20.341	20.583	20.790	22.566
180. Plososari	41.684	41.481	41.673	41.793	42.072	43.447
190. Kabuh	38.764	39.005	38.998	38.977	39.150	42.334
200. Plandaan	37.052	37.111	37.663	37.823	37.845	38.270
Jumlah	1.155.449	1.161.068	1.163.420	1.165.720	1.174.059	1.340.229

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 - Tahun 2029

Berdasarkan hasil data di atas, terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di setiap Kecamatan di Kabupaten Jombang. Perkembangan penduduk di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2008.

b. Jumlah Penduduk Dan Kepadatan

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jombang sebesar 3.254 jiwa/Km². Tingkat kepadatan paling rendah yaitu sekitar 257 jiwa/Km² berada di Kecamatan Wonosalam. Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk di wilayah perencanaan selama enam tahun terakhir dilihat pada Tabel 8 dan pada Gambar 2.

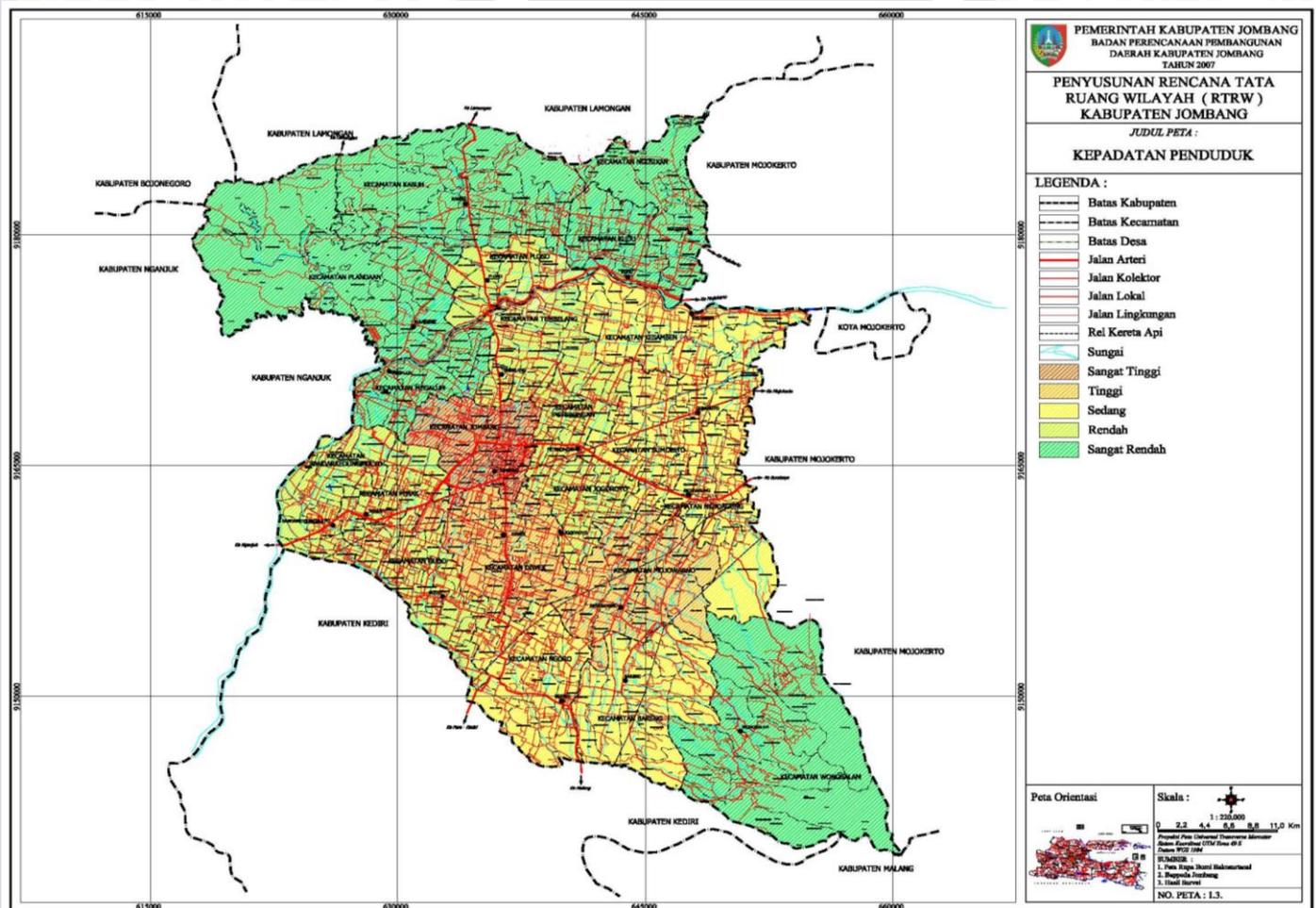
Tabel 8
Kepadatan Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan 2003-2008

Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Kepadatan Penduduk					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008*)
01. Bandar Kedung Mulyo	32,50	1.391	1.393	1.399	1.401	1.408	1.536
020. Perak	29,05	1.676	1.686	1.699	1.700	1.701	2.009
030. Gudo	34,39	1.533	1.536	1.539	1.541	1.546	1.718
040. Diwek	47,70	1.913	1.919	1.932	1.937	1.947	2.382
050. Ngoro	49,86	1.311	1.315	1.315	1.322	1.365	1.630
060. Mojowarno	78,62	1.029	1.034	1.035	1.034	1.035	1.195
070. Bareng	94,27	528	532	538	541	542	607
080. Wonosalam	121,63	251	255	257	257	257	291
090. Mojoagung	60,18	1.176	1.185	1.182	1.188	1.199	1.268
100. Sumobito	47,64	1.553	1.565	1.563	1.564	1.571	1.779
110. Jogoroto	28,28	1.904	1.905	1.906	1.909	1.983	2.354
120. Peterongan	29,47	1.933	1.946	1.936	1.940	1.939	2.330
130. Jombang	36,40	3.246	3.262	3.260	3.254	3.247	4.056
140. Megaluh	28,41	1.309	1.330	1.336	1.338	1.339	1.494
150. Tembelang	32,94	1.530	1.542	1.565	1.569	1.568	1.682
160. Kesamben	51,72	1.186	1.188	1.186	1.191	1.195	1.375
170. Kudus	27,54	1.078	1.079	1.084	1.088	1.132	1.154
171. Ngusikan	50,21	421	421	405	410	414	449
180. Ploso	25,96	1.606	1.598	1.605	1.610	1.621	1.674
190. Kabuh	132,33	293	295	295	295	296	320
200. Plandaan	120,40	308	308	313	314	314	318
Jumlah	1.159,50	997	1.001	1.003	1.005	1.013	1.156

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 - Tahun 2029

Berdasarkan hasil data pada tabel 8, dilihat dari tingkat kepadatannya pada tahun 2006 penduduk di Kecamatan Jombang mempunyai tingkat kepadatan paling tinggi, yakni sebesar 3.254 jiwa/Km².

Gambar 2
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Jombang



Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 - Tahun 2029

2.3 Potensi Ekonomi Wilayah

2.3.1 Komuditas

a. Pertanian

Penggunaan tanah pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Penggunaan tanah terbesar adalah

untuk sawah tercatat 51.904 Ha atau 44,78 persen dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Dari luas tanah sawah yang ada, jika dilihat dari jenis pengairannya maka 39.908 Ha atau 92.04 persen berpengairan teknis, 1768 Ha atau 4.08 persen sawah tadah hujan, 1171 Ha atau 2.70 persen sawah $\frac{1}{2}$ teknis, 514 Ha atau 1.19 persen sawah non PU. Rata-rata produksi/produktivitas padi (padi sawah dan ladang) di Kabupaten Jombang pada tahun 2007 sebanyak 58,27 Kw/Ha dengan luas panen bersih 63,286 Ha dan produksi 368.761 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Bareng dengan total produksi 37.359 ton dan luas panen bersih sebesar 6471 Ha. Sedang Kecamatan Sumobito memiliki produktifitas paling tinggi yaitu 63,14 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 3.306 Ha. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki luas panen padi sawah meskipun terdapat dua Kecamatan yang relatif kecil luas panennya, yaitu Kecamatan Wonosalam (1019 Ha) dan Kecamatan Ngusikan (977 Ha).

b. Perkebunan

Data perkembangan luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan rakyat tahun 2005-2006 adanya peningkatan luas areal jambu mete dari 135,78 Ha menjadi 135,98 Ha, sehingga produksinya meningkat dari 42,01 ton menjadi 42,07 ton atau naik 0,14 persen. Sementara itu luas areal pohon kelapa mengalami penurunan dari 2.084,48 Ha menjadi 2.055,48 Ha selama tahun 2006. namun produksi kelapa naik dari 1.518,45 ton menjadi 1.600,57 ton atau naik 5,13 persen. Perkebunan kopi yang hanya terdapat di Kecamatan Wonosalam, pada tahun 2006 luas arealnya mencapai 1.182,55 Ha atau terjadi peningkatan sebesar 1,69 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga

produksinya mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen. Sedangkan untuk perkebunan cengkeh yang juga hanya terdapat di Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Bareng pada tahun 2006 luas areal tetap dibanding tahun sebelumnya yaitu 2.297,63 Ha, tetapi produksinya mengalami kenaikan sebesar 6,67 persen.

Prospek pengembangan kawasan perkebunan adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya, yang diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat/petani pekebunan dan pelaku usaha lainnya. Kegiatan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Kudu dengan sektor kegiatan tanaman komoditas perkebunan berupa jambu mete, kelapa, kopi, tembakau dan kakao. Dimana rencana pengembangan kegiatan perkebunan direncanakan meliputi pengembangan kawasan perkebunan dan pengembangan komoditas perkebunan di lahan milik rakyat.

c. Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar per Kecamatan se Kabupaten Jombang. Dari tabel tersebut nampak bahwa pada tahun 2007 terdapat beberapa ternak yang mengalami peningkatan dan penurunan jumlah populasinya. Populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah Sapi potong sebesar 1,00 persen dan kambing sebesar 1.05 persen, sedangkan yang mengalami penurunan adalah sapi perah sebesar 0,95 persen dan kerbau turun 0.67 persen. Sedangkan populasi kuda

di Kabupaten Jombang tetap. Populasi kuda terbanyak terdapat di Kecamatan Jombang, sapi potong terbanyak terdapat di Kecamatan Diwek, sapi perah terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosalam dan kerbau terbanyak di Kecamatan Gudo dan Kesamben.

Prospek pengembangan kawasan peternakan ke depan yaitu dengan mengatur pemanfaatan lahan atau kawasannya sebagai berikut :

- Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh, Bareng dan Kecamatan Plandaan, sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek, dan Mojoagung.
 - Ternak Kecil (Kambing dan Domba), diarahkan di sisi utara Kabupaten Jombang meliputi Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Kudu, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Ngusikan.
- Unggas (Ayam Petelur, Ayam Potong, Itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan dengan permukiman yakni di Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Kabuh.

d. Perikanan

Perkembangan produksi perikanan perairan umum, sawah tambak, kolam, mina padi dan keramba. Total produksi perikanan mengalami penurunan 1.054 persen dibandingkan tahun 2006. Bila dirinci lebih jauh produksi perikanan perairan umum juga mengalami penurunan sampai 100 persen. Produksi ikan terbesar adalah dari jenis ikan lele sebesar 4.656,50 ton.

Prospek pengembangan Kawasan perikanan di Kabupaten Jombang ke depan dapat dialokasikan pada kawasan sekitar sungai-sungai besar. Sementara ini perkembangan perikanan khususnya kolam paling besar berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Pada pengembangan selanjutnya alokasi pengembangan kawasan perikanan tetap mempertahankan pola yang sudah ada, dan untuk mengakomodasi perkembangan selanjutnya, penentuan kawasan perikanan dialokasikan di Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

e. Industri Pengolahan

Sampai tahun 2007, profil industri pengolahan di Kabupaten Jombang masih didominasi oleh industri kecil. Dominasi ini dapat dilihat dari persentase jumlah industri kecil yang mencapai 97,11 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 66,35 persen. Jenis industri yang didirikan akan berkaitan erat dengan besaran nilai investasi yang ditanam. Total nilai investasi di sektor industri pengolahan yang ditanam di Kabupaten Jombang pada tahun 2007 mencapai 14.154,00 juta rupiah.

Kawasan industri di Kabupaten Jombang memiliki prospek untuk dikembangkan dalam bentuk zona, industrial estate, atau dalam bentuk lokasi industri, yang terdiri dari:

1. Industrial estate terdapat di Kecamatan Ploso di rencanakan dengan luas lahan 899,87 Ha.
2. Zona industri manufaktur dan agroindustri terdapat di Kecamatan Mojowarno dengan luas lahan sebesar 54,76 Ha dan di kecamatan Bandar

Kedungmulyo dengan luas lahan sebesar 172,76 Ha, serta terdapat zona industri di koridor Mojoagung-Jombang, Kecamatan Diwek dan Ngoro di Kabupaten Jombang

3. Lokasi Kegiatan Industri Kecil

- a. Sentra industri kuningan terdapat di Mojoagung
- b. Lokasi industri kecil, yakni : industri tempe di Diwek, industri tahu di Jogoroto, industri tape di Diwek, industri krupuk di Diwek dan Ngoro, industri jamu instant di Gudo dan Sumobito, industri daur ulang alumunium di Sumobito, industri tas plastik, tas dan dompet di Mojowarno dan anyaman di Ngoro dan industri manik-manik di Gudo. Sentra industri kecil ini pada umumnya merupakan permukiman industri dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan tiap rumah. Masih dapat dipertahankan namun tidak diarahkan untuk dikembangkan dengan luas ruang yang lebih luas dari sekarang.

f. Perdagangan

Penerbitan SIUP dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini meningkat tajam. Pada tahun 2006, untuk kelompok pedagang besar ada 10 penerbitan SIUP. Angka ini turun sekitar 11,11 persen dibanding tahun 2005 yang hanya mencapai 10 penerbitan SIUP. Sementara untuk kelompok pedagang menengah juga mengalami penurunan sebesar 2,33 persen, sedangkan untuk pedagang kecil angkanya justru meningkat pesat 92,15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten Jombang memiliki 17 pasar dan 14 pertokoan/ruko yang tersebar hampir di semua kecamatan. Semua pasar mempunyai fasilitas los, kios

dan toko/ruko. Hanya Pasar Jombang Legi (di Emplasemen PT. KAI), Mojowarno, Cukir dan Tunggorono yang tidak mempunyai toko/ruko. Sedangkan jumlah pedagang yang menempati los sebanyak 5.042, kios 3.512 dan toko/ruko 493. Di Kabupaten Jombang terdapat 11 hotel dengan jumlah kamar minimal 8 dan maksimal 58 kamar. Adapun tarif terendah Rp. 75.000,00 di Hotel Indah dan tarif tertinggi Rp. 100.000,00 di Hotel Fatma.

2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Dari data terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mengalami pertumbuhan positif, walaupun tidak secara merata di seluruh aspek yang terukur. Hingga tahun 2004, pertumbuhan ekonomi tertinggi didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 18.08 persen, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan yang paling rendah adalah sektor gas, listrik, dan air bersih yaitu 0.02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2005

No.	Sektor / Sub Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Pertanian	2,69%
2	Pertambangan Dan Penggalian	4,00%
3	Industri Pengolahan	5,41%
4	Listrik	7,27%
5	Konstruksi	3,21%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,50%
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,32%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,94%
9	Jasa-jasa	6,28%

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009 - Tahun 2029

Bila dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang hingga tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang

sangat drastis, hal inilah yang menjadi salah satu landasan bagi Pemerintah Jombang untuk mengembangkan pembangunan di semua sektor dan sub sektor.

3. Profil DPU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang

Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009, tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

a) Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum cipta karya, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- (1). Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- (2). Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- (3). Perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan serta pengawasan peralatan dan perbekalan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- (4). Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- (5). Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
- (6). Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan;
- (7). Pengelolaan tugas kesekretariatan;

- (8). Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi dan Misi

Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten Jombang, Dinas Pekerjaan Umum mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang, Pernyataan Visi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah : *“Terwujudnya permukiman yang berkembang dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera tahun 2013”*

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a). *“Permukiman”* adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- b). *“Berkembang”* adalah adanya upaya peningkatan pembangunan permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu pembangunan

dapat ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang.

- c). “*Berkelanjutan*” adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan (*environmental development*) sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada dengan mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.
- d). “*Masyarakat Sejahtera*” adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dengan mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang memiliki 2 (dua) Misi sebagai berikut :

- a). Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan;
- b). Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dengan dilandasi legalitas hukum.

b) Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai pelaksanaan Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan , perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum.

Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Misi tersebut, ditetapkan 4 (Empat) Tujuan pembangunan diarahkan pada prioritas tujuan sebagai berikut :

- a). Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
- b). Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c). Meningkatkan kualitas lingkungan yang hijau dan bersih;
- d). Mewujudkan Ruang Wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya Standar Pelayanan terhadap masyarakat

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dicapai maka diperlukan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peningkatan standar pelayanan terhadap masyarakat diperlukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

- 2). Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan

Untuk mendukung upaya peningkatan PAD maka perlu dilakukan peningkatan secara bertahap terhadap Penarikan Retribusi (Kebersihan

dan Taman) yang ada dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;

- 3). Meningkatnya Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan daerah
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang secara linear disesuaikan dengan kebutuhan operasional;
- 4). Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien
Untuk dasar peningkatan rancangan perundangan/peraturan daerah diperlukan pemahaman terhadap situasi dan kondisi *riil* di daerah;
- 5). Terwujudnya Infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat
Untuk meningkatkan pemenuhan terhadap kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial dengan nyaman dan aman;
- 6). Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan air bersih
Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih sesuai dengan amanat MDGs dan NAP terutama pada kawasan rawan air bersih;
- 7). Terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu
Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah layak dan sehat sesuai dengan amanat UUD 1945 terutama pada klaster masyarakat kurang mampu;

8). Terwujudnya peningkatan pengelolaan persampahan

Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan amanat MDGs (*Millenium Development Goals*) dan NAP (*National Action Plan*) terutama pada pengelolaan persampahan;

9). Terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar permukiman

Untuk meningkatkan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat akan mandi, cuci, kakus (sanitasi/MCK) sehingga meningkatkan perilaku hidup yang sehat;

10). Tertatanya pengelolaan pemakaman secara integral

Untuk mendukung terjaganya RTH dan menjaga kebersihan dan keindahan pada lokasi pemakaman sehingga dapat tertata dengan baik;

12). Terwujudnya Penataan Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Untuk mendukung terjaganya Pemanfaatan Tata Ruang terhadap laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman sehingga Perencanaan Tata Ruang dapat terjaga dan tertata dengan baik.

c) **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

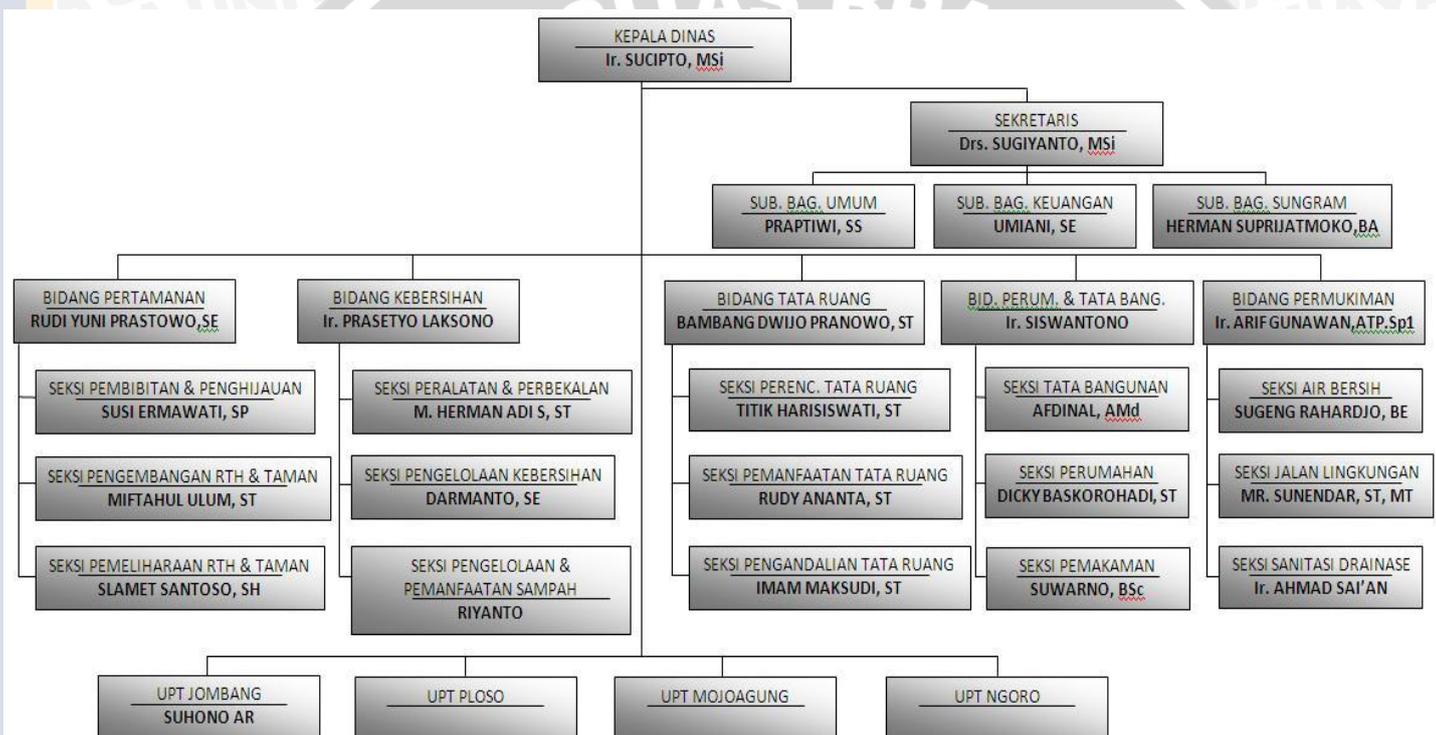
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pertamanan, membawahi :
- a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
 - c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.
4. Bidang Kebersihan, membawahi :
- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah.
5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
- Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
- Seksi Pengendalian Tata Ruang.
6. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, membawahi :
- a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan;
 - c. Seksi Pemakaman.
7. Bidang Permukiman, membawahi :
- a. Seksi Air Bersih;
 - b. Seksi Jalan Lingkungan;
 - c. Seksi Sanitasi dan Drainase.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas PU adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2011



Sumber : Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2011

d) Kondisi Umum Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang

1 Perkembangan Pelayanan Yang Diberikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata

Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah melaksanakan pelayanan baik kepada masyarakat maupun aparatur dengan perkembangan sebagai berikut :

a) Pelayanan Akses Jalan Lingkungan

Pelayanan terhadap kebutuhan jalan lingkungan meliputi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan setapak, pengguna pelayanan Akses Jalan Lingkungan ini adalah masyarakat dilingkungan permukiman yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan paradigma yang ada jalan lingkungan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang diutamakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang, hal ini dapat dilihat dari usulan Musrenbang yang diadakan setiap tahun oleh Pemkab Jombang. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah membangun jalan lingkungan dengan volume 528.522 m² dari total kebutuhan jalan lingkungan, dan telah dapat memenuhi secara tuntas pada 74 desa.

b) Pelayanan Saluran Drainase

Pelayanan terhadap kebutuhan saluran drainase meliputi Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong , Pembangunan trotoar pengguna pelayanan Saluran Drainase ini adalah masyarakat dilingkungan permukiman yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Dengan banyaknya program pembangunan yang berkembang di Pemerintahan Desa maka saluran drainase lebih banyak dibangun dengan program stimulan/swadaya masyarakat dan Program Pemerintah Pusat. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang,

Kebersihan dan Pertamanan telah membangun saluran drainase dengan volume 9417 m³ dari total kebutuhan saluran drainase.

c) Pelayanan Air Bersih

Pelayanan terhadap kebutuhan air bersih meliputi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih. pengguna pelayanan air bersih ini adalah masyarakat yang rawan air bersih dilingkungan permukiman yang ada di kawasan perdesaan. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah membangun sarana dan prasarana air bersih sekitar 30% dari 41 desa rawan air bersih.

d) Pelayanan Air Limbah (Domestik)/ Sanitasi

Pelayanan terhadap kebutuhan Air Limbah (Domestik)/ Sanitasi meliputi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih. pengguna pelayanan Air Limbah (Domestik)/ Sanitasi ini adalah masyarakat miskin dan permukiman kumuh. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah membangun Air Limbah (Domestik)/ Sanitasi pada 2 desa dengan Pogram SANIMAS. Sehingga masih ada 80% jumlah penduduk yang belum mempunyai sanitasi yang layak.

e) Pelayanan Perumahan

Pelayanan terhadap kebutuhan perumahan meliputi Pemugaran Rumah Tidak layak huni , dan GERTAK. pengguna pelayanan perumahan ini adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki

rumah/tempat tinggal. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah memugar 599 unit rumah tidak layak huni dari total 66.396 unit rumah tidak layak huni. Terhadap pemenuhan backlog perumahan masih belum dapat dilakukan oleh pemkab, kecuali lewat pembangunan perumahan lewat pihak swasta dengan pembangunan perumahan formal sejumlah 5.586 unit.

f) Pelayanan Ruang Terbuka Hijau / (Taman dan Pemakaman umum)

Pelayanan terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Hijau / (Taman dan Pemakaman umum) meliputi Pembangunan dan Pemeliharaan RTH, pengguna pelayanan ini adalah masyarakat dilingkungan permukiman yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah membangun Ruang Terbuka Hijau dengan volume 35.988 m² dan jalur hijau 4.400 m dari total kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan , sedangkan untuk wilayah kecamatan/desa masih belum tertangani secara keseluruhan.

g) Pelayanan Persampahan

Pelayanan Persampahan meliputi Pembangunan sarana dan prasarana persampahan dan pengelolaan kebersihan. pengguna pelayanan Akses Jalan Lingkungan ini adalah masyarakat dilingkungan permukiman yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan

telah melayani timbulan sampah 80% di perkotaan , sedangkan untuk wilayah perdesaan masih belum tertangani secara keseluruhan.

h) Pelayanan Tata Ruang

Pelayanan Tata Ruang secara umum telah dilakukan secara bertahap baik terhadap RTRW dan RTRD kawasan namun demikian dengan berkembangnya jumlah penduduk maka menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap penataan ruang tersebut, sehingga dengan berakhirnya produk hukum dari penataan ruang maka perlu dilakukan revisi terhadap produk hukum tersebut, Berdasarkan perkembangannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan revisi sekitar 10% dari kebutuhan produk hukum penataan ruang. Sehingga masih 90% kebutuhan yang perlu dipenuhi.

2. Potensi SDM

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya memiliki 78 orang pegawai yang terdiri dari 76 orang PNS dan 3 orang honorer.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dengan beban tugas yang ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan maka tentu saja perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang harus memadai agar pelaksanaan tugas berjalan secara optimal. Meskipun Sarana dan Prasarana pendukung yang ada masih belum memadai namun demikian tidak menyurutkan semangat seluruh personil dalam melaksanakan pelayan kepada masyarakat. Kondisi Sarana dan Prasarana yang

ada baru mencapai 30% dari yang diperlukan. Kendaraan Operasional pengangkutan sampah, Gerobak sampah, maupun personil untuk melaksanakan tugas masih jauh dari ketentuan yang ada dalam SNI.

Kendaraan Operasional terutama kendaraan roda dua untuk kegiatan struktural juga masih memerlukan penambahan, hal ini dikarenakan struktur organisasi yang ada telah berkembang menjadi besar dan memiliki kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dengan intensitas tinggi dan teritorial yang luas. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat sarana dan prasarana yang baru dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Prasarana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan Operasional.	
	a. Truck Sampah.	1
	- Arm Roll.	1
	- Dump Truck.	1
	d. Sepeda Motor Sampah (Gerobak).	
	- Beijing Kuning, tahun 2004.	2
	- Beijing Silver Yellow, tahun 2006.	7
	- Beijing Silver, tahun 2007.	3
2	Peralatan Kantor.	
	a. Komputer.	3
	b. Printer.	2
	c. HT.	5
	d. Papan Tulis.	1
	e. Mesin Ketik.	2
	f. AC.	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang

B. Penyajian Data Fokus

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

1.1 Pembagian Wilayah Pembangunan

Kabupaten Jombang dalam sistem perwilayahan tata ruang Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jombang. Menurut RTRW Kabupaten Jombang, wilayah Jombang dibagi dalam 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Setiap SSWP terdiri dari satu atau beberapa kecamatan yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Masing-masing SSWP direncanakan mempunyai pusat perwilayahan (pusat SSWP) dan struktur kegiatan utama (RTRW Kab. Jombang). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Staff Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang yaitu Bapak Rudi berikut:

“...Pemerintah Jombang dalam melaksanakan pengembangan pembangunan daerah membagi wilayah menjadi 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana pembagian ini tentu didasarkan pada fungsi dan potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut. Ada juga beberapa daerah yang menjadi wilayah pengembangan, seperti Kecamatan Jombang, Kecamatan Ploso, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bandarkedungmulyo...”

(wawancara dengan Staff DPU Cipta Karya Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan)

Dengan demikian, maka sistem perwilayahan di Kabupaten Jombang ini terbagi atas 5 SSWP yang mempunyai fungsi kegiatan serta pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di

Kabupaten Jombang. Hal ini nantinya akan mampu meningkatkan nilai investasi maupun perekonomian bagi Kabupaten Jombang pada kedepannya.

Kabupaten Jombang memiliki 5 SSWP yang mempunyai fungsi kegiatan, meliputi berikut:

1. SSWP Jombang dan sekitarnya dengan pusat di Jombang, wilayahnya meliputi : Kecamatan Jombang, Diwek, Gudo, Perak, Bandar Kedungmulyo, Tembelang, Megaluh, Jogoroto dan Peterongan. Kegiatan utamanya yaitu perdagangan, pendidikan, agro industri, jasa, dan pertanian.
2. SSWP Ploso dan sekitarnya dengan pusat di Kecamatan Ploso, wilayahnya meliputi : Kecamatan Ploso, Kabuh, Kudu dan Plandaan. Kegiatan utamanya yaitu pertanian, perdagangan, pendidikan dan industri kerajinan.
3. SSWP Mojoagung yang berpusat di Mojoagung, wilayahnya meliputi : Kecamatan Mojoagung, Sumobito dan Kesamben. Kegiatan utamanya yaitu pertanian, perdagangan, industri kerajinan dan pendidikan.
4. SSWP Mojowarno dengan pusat di Mojowarno, wilayahnya meliputi : Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Bareng dan Wonosalam dengan aktivitas utamanya pertanian, perdagangan, perkebunan, pendidikan, hortikultura, pariwisata dan argo industri.
5. SSWP Bandarkedungmulyo dengan pusat di Bandarkedungmulyo, wilayahnya meliputi : Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Megaluh dengan aktivitas utamanya industri kecil, manufaktur, dan pariwisata.

1.2 Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur menetapkan Kabupaten Jombang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Plus. Fungsi Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Plus meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Didalam konstelasi penataan Wilayah Gerbangkertosusila Plus tersebut, Kabupaten Jombang merupakan wilayah untuk pengembangan kegiatan Pertanian, Perdagangan, Industri. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang diungkapkan oleh Staff Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang yaitu Bapak Rudi berikut:

“...Pada RTRW Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang mengambil peran pengembangan pertanian melalui penataan kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Jombang. Perdagangan diarahkan ke perdagangan agribisnis, dan bertumpu pula pada perdagangan pasar tradisional di kawasan pedesaan atau pasar kecamatan. Kegiatan industri diarahkan untuk industri pengolahan, industri manufaktur dan industri berbasis pertanian dan perkebunan...”

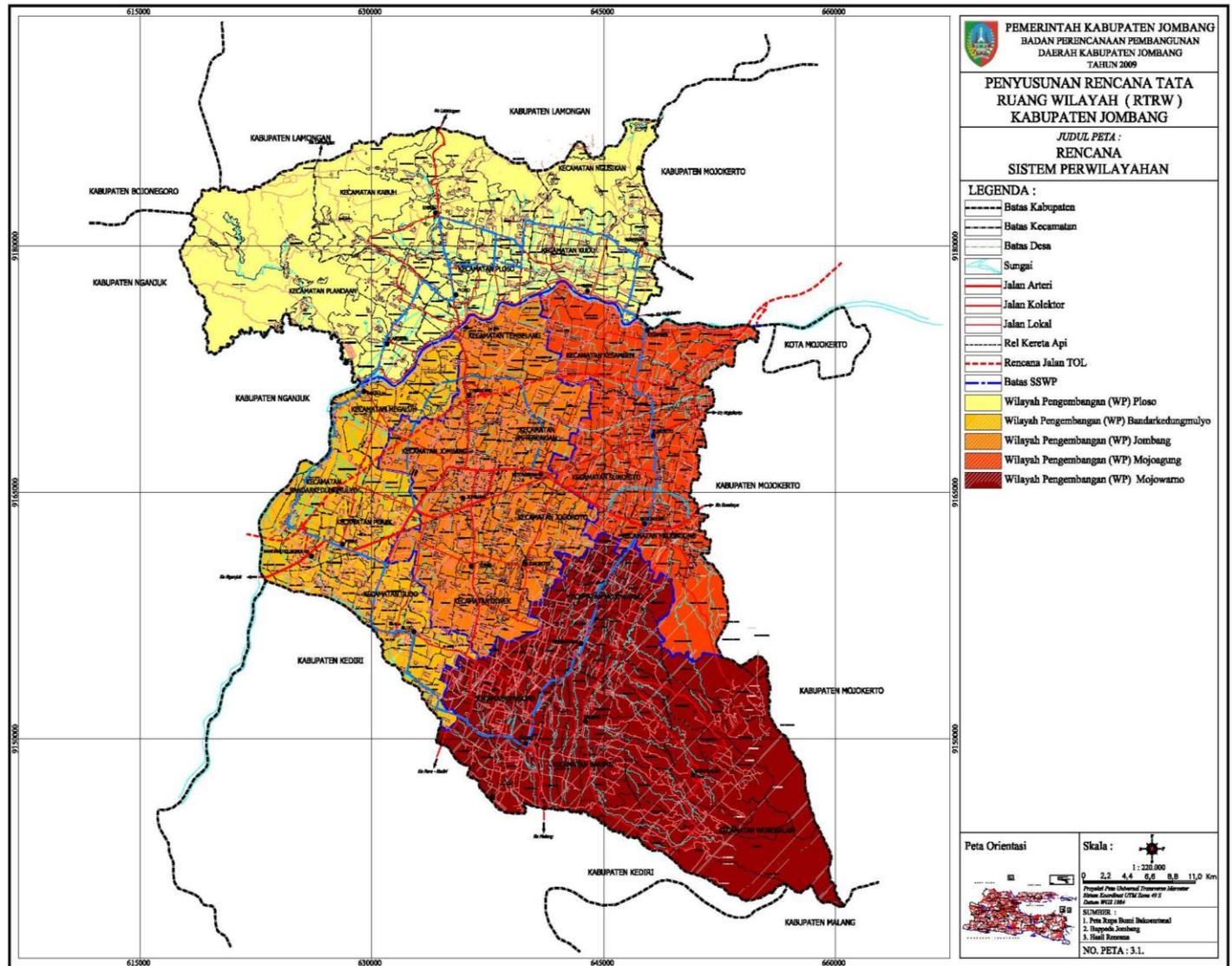
(wawancara dengan Staff DPU Cipta Karya Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan)

Berdasarkan data hasil wawancara di atas, maka penjabaran secara kewilayahan pada Kabupaten Jombang meliputi Perkembangan kegiatan pertanian diarahkan di 3 Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) yaitu pada kecamatan Bareng, Wonosalam dan Ngoro. Perdagangan skala regional di arahkan di Mojoagung, perdagangan agribisnis di arahkan berpusat di Agropolitan Center Mojowarno. Kegiatan industri dikembangkan di Perkotaan Ploso untuk industri

skala besar dengan menyediakan kawasan industri, dan industri manufaktur diarahkan di kawasan industri Bandarkedungmulyo sedangkan agroindustri berpusat di Perkotaan Mojowarno. Dengan demikian, pemerintah daerah mampu mengontrol serta mengevaluasi pemanfaatan tata ruang di berbagai wilayah Jombang yang sesuai dengan tata guna dan pemanfaatan lahan.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pengembangan (WP). Batas Wilayah Pengembangan (WP) didasarkan pada batas administrasi wilayah. Setiap WP terdiri dari beberapa kecamatan yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Masing-masing WP direncanakan mempunyai pusat perwilayahan (pusat WP) dan fungsi perwilayahan dan kegiatan utama yang akan dikembangkan. Pusat WP adalah perkotaan dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Fungsi WP mendefinisikan peran dan kedudukan WP dan Pusat Kejadiannya terhadap wilayah pengembangan lainnya di Kabupaten Jombang. Sistem perwilayahan Ruang Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Peta 3.

Gambar 3
Peta Sistem Perwilayahan Kabupaten Jombang



Sumber: RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2010

Adapun beberapa wilayah kecamatan yang menjadi wilayah pengembangan. 5 (Lima) Wilayah Pengembangan Kabupaten Jombang meliputi :

a. Wilayah Pengembangan (WP) Jombang.

1. WP Jombang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Diwek.

2. Pusat WP Jombang : Perkotaan Jombang

2. Fungsi :

- a. WP Jombang merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten Jombang.
- b. Fungsi WP Jombang sebagai pusat pelayanan skala kabupaten yang meliputi : pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala Kabupaten Jombang.

3. Kegiatan Utama yang dikembangkan :

- a. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah Sektor Perdagangan dan industri secara terbatas pada lokasi yang telah industri yang telah ada dengan skala kegiatan sampai dengan menengah serta luasan lokasi secara terbatas
 - b. Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi SSWP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten adalah kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten.
- Sistem dan fungsi perwilayahan di WP Jombang dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Sistem dan Fungsi Kegiatan WP Jombang

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN WILAYAH
Jombang	Pusat pelayanan pemerintahan, jasa komersial skala WP, pendidikan tinggi dan menengah, serta kesehatan wilayah.	- Pemerintahan - Perdagangan dan jasa komersial
Tembelang	pengembangan lokasi perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pengembangan kawasan perumahan perkotaan dan pemerintahan	- Perdagangan dan jasa komersial - pemerintahan - Pendidikan - kesehatan - pertanian
Jogoroto	Wilayah pengembangan perumahan dan wilayah pendukung ruang terbuka perkotaan.	- Perdagangan dan jasa komersial - Pertanian
Peterongan	Pendukung perkotaan Jombang dalam perdagangan dan jasa komersial dan pengembangan kawasan perumahan perkotaan.	- Perdagangan dan jasa komersial - Transportasi - Pariwisata
Diwek	Pengembangan kawasan pendidikan dan pengembangan kawasan perumahan.	- Pendidikan - Perdagangan dan jasa komersial - Pariwisata - Industri

Sumber : Pengolahan Data Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2007/2008;

RTRWP Jawa Timur

Berdasarkan data tabel di atas, maka sistem dan fungsi kegiatan WP Jombang yang berpusat di Kecamatan Jombang serta wilayah sekitarnya meliputi Kecamatan Tembelang, Jogoroto, Peterongan dan Diwek. Dan fungsi wilayahnya di Kecamatan Jombang sebagai pelayanan pemerintahan dan pendidikan.

b. Wilayah Pengembangan (WP) Mojoagung

1. WP Mojoagung meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, dan Kecamatan Kesamben.
2. Pusat WP : Perkotaan Mojoagung

3. Fungsi :

- a) sebagai wilayah pengembangan kawasan perekonomian terpadu Kabupaten Jombang.
- b) sebagai pusat koleksi dan distribusi (perdagangan) skala Kabupaten Jombang.

4. Kegiatan Utama yang dikembangkan :

- a) Perdagangan
- b) Industri (penempatan terbatas dan bersyarat) dan pergudangan.

Sistem dan fungsi perwilayahan di WP Mojoagung dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Mojoagung

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN WILAYAH
Mojoagung	Pusat pelayanan kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa, yaitu sebagai wilayah pengembangan kawasan perdagangan terpadu dengan pusat kegiatan transportasi wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan jasa komersial - Transportasi - Pariwisata - kehutanan dan perkebunan - Industri Kecil
Sumobito	Kawasan pengembangan pertanian, Eksploitasi potensi pertambangan, dan industri kecil.	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Industri kecil dan pergudangan - Transportasi - Pertanian di bagian barat - Pariwisata
Kesamben	Wilayah yang dipertahankan sebagai wilayah pertanian dan lokasi eksploitasi potensi pertambangan secara terbatas.	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Pertambangan

Sumber : Pengolahan Data Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2007/2008;

RTRWP Jawa Timur

Seperti apa yang telah dijelaskan pada tabel 13, maka maka sistem dan fungsi kegiatan WP Mojoagung yang berpusat di Kecamatan Mojoagung serta wilayah sekitarnya meliputi Kecamatan Sumobito dan Kesamben. Dan fungsi wilayahnya sebagai kawasan pengembangan pertanian, eksploitasi potensi pertambangan, dan industri kecil.

c. Wilayah Pengembangan (WP) Ploso

1. WP Ploso meliputi wilayah administrasi Kecamatan Ploso, Kecamatan

Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan

Plandaan.

2. Pusat WP : Perkotaan Ploso.

3. Fungsi:

a) Wilayah pengembangan kegiatan perkotaan dan bukan pertanian di bagian utara Kabupaten Jombang.

b) Merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.

4. Kegiatan Utama yang dikembangkan :

a) Industri

b) Perdagangan

c) Perkebunan dan kehutanan

d) Pariwisata

e) Pertanian

Sistem dan fungsi perwilayahan di WP Ploso dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Ploso

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN WILAYAH
Ploso	Pengembangan Kawasan Industri skala besar	- Industri - Perdagangan
Kabuh	Pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan	- Perdagangan - Perkebunan - Industri dan pergudangan
Plandaan	Pengembangan kawasan kehutanan dan pertanian	- Pertanian - Kehutanan - Pariwisata
Kudu	Pengembangan pergudangan dan pengembangan kawasan perumahan industri	- Kehutanan - Pariwisata - Pertanian
Ngusikan	Wilayah pengembangan kehutanan dan perkebunan	- Kehutanan - Pertanian

Sumber : Pengolahan Data Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2007/2008;

RTRWP Jawa Timur

Berdasarkan data tabel di atas, maka sistem dan fungsi kegiatan WP Ploso yang berpusat di Kecamatan Ploso serta wilayah sekitarnya meliputi Kecamatan Kabuh, Plandaan, Kudu dan Ngusikan. Dan fungsi wilayahnya sebagai pengembangan kawasan industri skala besar dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.

Pengembangan WP Ploso disertai dengan pengembangan:

1. permukiman industri
2. pelayanan kesehatan dengan pembangunan rumah sakit dengan tipe D.
3. Peningkatan pelayanan air bersih dengan pipa PDAM yang mendukung kegiatan industri dan permukiman,
4. pembangunan waduk di bagian Utara Sungai Brantas yang berfungsi menyediakan pelayanan air bersih,

5. menyediakan *buffer zone* berupa ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai pemisah pencegahan polusi dari kegiatan industri besar dengan kegiatan permukiman disekitarnya.

d. Wilayah Pengembangan (WP) Bandar Kedungmulyo

- 1) WP Bandar Kedungmulyo meliputi wilayah administrasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Gudo.
- 2) Pusat WP : Perkotaan Bandar Kedungmulyo.
- 3) Fungsi WP Bandar Kedungmulyo :
 - a. Wilayah pengembangan pusat permukiman perkotaan di bagian selatan Jombang
 - b. Sebagai kawasan industri manufaktur.
- 4) Kegiatan Utama yang dikembangkan
 - a. Industri
 - b. Perdagangan
 - c. Pertanian
 - d. Pariwisata

Sistem dan fungsi perwilayahan di WP Bandar Kedungmulyo dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15
Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Bandar Kedungmulyo

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN WILAYAH
Bandar Kedungmulyo	Pengembangan kawasan industri Manufaktur di bagian selatan wilayah Kabupaten Jombang.	- Industri - Perdagangan - Pertanian
Megaluh	Wilayah pertanian.	- Pertanian
Perak	Wilayah pengembangan kawasan perumahan di sekitar kawasan SSWP Jombang.	- Perdagangan - Pertanian
Gudo	Wilayah pengembangan industri kecil.	- Industri kecil - Pariwisata

Sumber : Pengolahan Data Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2007/2008;

RTRWP Jawa Timur

Dari hasil data pada tabel di atas, maka sistem dan fungsi kegiatan WP Bandar Kedungmulyo yang berpusat di Kecamatan Bandar Kedungmulyo serta wilayah sekitarnya meliputi Kecamatan Megaluh, Perak dan Gudo. Serta fungsi wilayahnya sebagai pengembangan kawasan industri manufaktur di bagian selatan wilayah Kabupaten Jombang.

e. Wilayah Pengembangan (WP) Mojowarno

- 1) WP Mojowarno meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro.
- 2) Pusat WP : Perkotaan Mojowarno
- 3) Peran Dan Fungsi Utama WP Mojowarno :
 - a. WP Mojowarno adalah sebagai pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Jombang.
 - b. Sebagai wilayah pengembangan potensi Sumber Daya Alam dan wilayah pengembangan Pariwisata di wilayah

Kabupaten Jombang. Dalam rangka mendukung fungsi tersebut perlu dikembangkan pusat penelitian dan pendidikan untuk pengembangan SDM yang diarahkan disektor Agrobisnis.

- c. Struktur Kegiatan Utama : perkebunan, perdagangan, pariwisata, kehutanan, agroindustri, pertanian

Kegiatan industri menegah terutama agroindustri dikembangkan di Perkotaan Mojowarno dan melakukan pengolahan dari hasil pertanian dan perkebunan di Perkotaan Ngoro, Wonosalam, dan Bareng. Untuk meningkatkan perkembangan Perkotaan Wonosalam yang lokasinya jauh dari perkotaan lainnya di Kabupaten Jombang, maka pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Wonosalam dan Mojowarno hingga ke Perkotaan Jombang.

Wilayah Mojowarno diprioritaskan pada kegiatan pada agroindustri, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata. Pengembangan agroindustri dengan pengelolaan hasil pertanian dan komoditi tanaman perkebunan seperti mete, kelapa, cengkeh, kapuk, kenanga, temulawak, lada, kencur, jahe, serai, kunyit, lengkuas, pandan, kakao, tebu, tembakau virginia, tembakau jawa, dan kopi. Industri anyaman dipertahankan.

Sistem dan fungsi perwilayahan di WP Mojowarno dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16
Fungsi dan Sistem Kegiatan WP Mojowarno

KECAMATAN	FUNGSI WILAYAH	SISTEM KEGIATAN WILAYAH
Mojowarno	Pusat agribisnis wilayah Jombang. Sebagai pusat pengembangan agropolitan Kabupaten Jombang (agropolitan center)	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Pariwisata - Kehutanan - Pertanian` - Agribisnis - Agroindustri
Bareng	Pengembangan pertanian, perkebunan, industri kecil dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Pariwisata
Ngoro	Pengembangan pertanian khususnya kawasan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perdagangan
Wonosalam	Wilayah yang diarahkan sebagai wilayah konservasi Sumberdaya Alam dan pengembangan pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Kehutanan - Perkebunan

Sumber: Pengolahan Data Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2007/2008;RTRWP Jawa Timur

Dari hasil data pada tabel di atas, maka sistem dan fungsi kegiatan WP Mojowarno yang berpusat di Kecamatan Mojowarno serta wilayah sekitarnya meliputi Kecamatan Bareng, Ngoro dan Wonosalam. Serta fungsi wilayahnya sebagai Pusat agribisnis wilayah Jombang. Sebagai pusat pengembangan agropolitan Kabupaten Jombang (agropolitan center) dan wilayah yang diarahkan sebagai wilayah konservasi sumberdaya alam dan pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Jombang.

1.3 Strategi Pengembangan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan tidak terlepas dari kebijakan yang telah terangkum dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2008-2013. Untuk mengetahui strategi pengembangan

kabupaten yang telah dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Jombang khusus dalam urusan Cipta karya, Penataan Ruang dan Perumahan, menurut staff Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, yaitu Bapak Rudi:

“...Untuk mencapai sasaran terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu terdapat Program Pengembangan Perumahan. Untuk mencapai sasaran terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar permukiman terdapat Program Lingkungan Sehat Perumahan. Serta untuk mencapai sasaran terwujudnya infrastruktur lingkungan permukiman terdapat Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong...”

(wawancara dengan Staff Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang)

Di dalam proses pembangunan, urusan mengenai pemukiman perlu adanya solusi perencanaan, pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini telah merencanakan sebuah program yang berorientasi pada terwujudnya pemukiman dan hunian yang layak huni di wilayah Kabupaten Jombang. Dengan adanya program-program tersebut, maka kedepannya diharapkan Kabupaten Jombang telah mampu memenuhi target dalam aspek terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakatnya.

2. Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Upaya Pengembangan Pembangunan

Daerah

2.1 Pemanfaatan Lahan

a. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Jombang dibedakan menjadi dua macam yaitu kawasan yang dikelola dalam bentuk perkebunan dan lahan

pertanian yang digunakan untuk menanam jenis tanaman/komoditi perkebunan. Untuk kawasan yang dikelola dalam bentuk perkebunan hanya terdapat di Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam yaitu seluas 2626,11 Ha yang ditanami kakao, cengkeh, dan kopi. Adapun untuk lahan pertanian yang digunakan untuk komoditi perkebunan ditanami tanaman, seperti : mete, kelapa, kapuk, kenanga, temulawak, lada, kencur, jahe, serai, kunyit, lengkuas, pandan, tebu, tembakau jawa rakyat, dan tembakau virginia.

“...Adapun beberapa kawasan yang perlu dipertahankan antara lain lahan perkebunan yang ada di Kecamatan Wonosalam, Barend dan Ngoro. Hal tersebut dilakukan untuk mensinergikan antara tataguna lahan dengan misi Kabupaten Jombang yaitu meningkatkan perekonomian daerah berbasis agrobisnis...”

(wawancara dengan Staff Bappeda yaitu dengan Bapak Anang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi Kabupaten jombang, maka pemerintah daerah masih mempertahankan wilyah atau kawasan yang dianggap menjadi sentra perkebunan yang potensinya sangat besar.

b. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Jombang secara keseluruhan seluas 51.430,69 Ha atau seluas 49,7% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jombang. Kawasan pertanian di Kabupaten Jombang terbagi atas : pertanian sawah 38.066,59 Ha, kawasan pertanian sawah paling luas terdapat di Kecamatan Barend dengan luas 5.540,81 Ha, sedangkan kawasan pertanian lainnya yaitu tegalan seluas 13.364,10 Ha, kawasan tegalan paling luas terdapat di Kecamatan Wonosalam dengan luas 4.090,20 Ha.

“...Pada hakekatnya, wilayah Jombang hampir 50% adalah kawasan pertanian, dimana sektor pertanianlah yang menjadi nafkah bagi kehidupan

masyarakat di beberapa wilayah kecamatan di Jombang. Dan hampir semua kawasan itu merupakan persawahan yang berada di sekitar aliran sungai berantas..”

(wawancara dengan Staff Bappeda yaitu Bapak Anang)

Berdasarkan dari data wawancara menunjukkan bahwa kondisi yang diharapkan pada kawasan ini mampu menciptakan swasembada beras dan juga merupakan daerah penyangga kebutuhan akan beras di Jawa Timur. Hal tersebut juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Jombang terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

c. Kawasan Peternakan

Di Kabupaten Jombang terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan baik ternak besar maupun ternak kecil serta unggas. Kawasan peternakan yang dimaksud di sini adalah kegiatan peternakan yang membentuk satu kesatuan kawasan atau karakter kawasan dengan pengaruh kegiatan peternakan cukup signifikan.

d. Kawasan Perikanan

Kegiatan perikanan berpeluang dikembangkan di Kecamatan Jombang, Diwek, Ngoro, Perak, Sumobito, Plandaan, Bareng, Megaluh, Kudu, Gudo, Jogoroto, Mojoagung dan Mojowarno. Jenis perikanan darat lainnya adalah perikanan Cek Dam dan perairan umum lainnya dapat dikembangkan di Kecamatan Mojoagung, Kesamben, Kudu, Bareng, Wonosalam, Bandar Kedungmulyo, Perak dan Gudo. Kegiatan perikanan di Kabupaten Jombang

meliputi kegiatan perikanan kolam dan mina padi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 23.

e. Kawasan Pertambangan

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Jombang adalah bahan tambang golongan C (pasir), yang berada di sepanjang Sungai Brantas yaitu di Kecamatan Plandaan, Ploso dan Kudu. Kegiatan penambangan perlu perencanaan dan pengawasan, agar tidak merusak lingkungan, terutama kegiatan penambangan batu kali/batu belah dan pasir, agar tidak menyebabkan erosi, tidak merubah batas sungai/pengikisan sungai dan tidak mengganggu kegiatan yang lain. Bahan galian mineral yang terdapat di Kabupaten Jombang adalah sumur iodium yang terdapat di Kecamatan Tembelang. Sumber minyak bumi yang saat ini masih pada tahap eksplorasi oleh Pertamina terdapat di Kecamatan Plandaan.

Upaya mengeksplorasi dan mengeksploitas gas alam di lakukan oleh Exxon Mobil di Kabupaten Jombang, masuk dalam kawasan Blok Gunting. Metode eksplorasi ini dipergunakan untuk mengetahui kedalaman dan orientasi formasi batuan dibawah permukaan, tanpa melakukan pemboran sumur secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh Staff Bappeda yaitu Bapak Anang, berikut:

“..Perioda Eksplorasi Pertama dalam 3 tahun, dilakukan Penyelidikan Seismik 2-D \pm 400 km. Dan dalam waktu dekat survei lebih lanjut akan dilakukan Exxon Mobile dengan didampingi Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pengawas..”

(wawancara dengan Staff Bappeda)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang sangat memperhatikan serta bertanggung jawab atas apa yang menjadi

pengelolaan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah Jombang yang sesuai dengan pemanfaatan lahan terutama bagi lahan eksplorasi.

f. Kawasan Khusus

Kawasan khusus di sini adalah area yang bersifat spesifik termasuk dalam bidang pengelolaan, dan karakternya. Kawasan khusus di wilayah Kabupaten Jombang adalah : kawasan militer yang cukup luas yakni, Sata Radar Auri I Surabaya berada di Desa Menduro Kecamatan Kabuh. Selain itu terdapat lapangan tembak milik angkatan udara. Kawasan ini pada sistem perwilayahan Kabupaten Jombang tidak secara langsung direncanakan pengembangannya, namun lebih kepada pengaturan dan pengelolaan kawasan sekitarnya.

g. Kawasan Permukiman Perkotaan

Di wilayah Kabupaten Jombang yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan Ibukota Kecamatan dan kawasan-kawasan lainnya yang memiliki sifat-sifat sebagai kawasan perkotaan. Pada wilayah ini dominasi kegiatannya bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Permukiman yang terletak di wilayah perkotaan atau sub urban (pinggiran kota) cenderung berkembang cepat seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan Jombang.

h. Kawasan Permukiman Perdesaan

Dari segi geografis desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang saling beriteraksi antar unsur-

unsur tersebut juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Berdasarkan pada tingkat pendidikan dan teknologi yang penduduknya masih tergolong belum berkembang maka kenampakannya adalah sebagai suatu wilayah yang tidak luas, dengan corak kehidupan yang bersifat agraris dengan kehidupan yang sederhana. Jumlah penduduknya tidak besar dan letak wilayahnya relatif jauh dari kota dan umumnya terdiri dari permukiman penduduk, pekarangan dan persawahan, jaringan jalan belum begitu padat dan sarana transportasi masih sangat langka.

i. Kawasan Pondok Pesantren

Pondok Pesantren (Pontren) memiliki karakter khas yang unik, dan pada tahap memberi pengaruh cukup besar terhadap dinamika kawasan sekitarnya. Pondok pesantren sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Jombang memberi pengaruh cukup besar bagi perkembangan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitarnya, terutama perkembangan pemanfaatan lahan terbangun dan ketersediaan infrastruktur. Kabupaten Jombang menetapkan satu kawasan khusus yang menjadi ciri khas atau maskot Jombang, yaitu kawasan pendidikan dan pondok pesantren. Kabupaten Jombang memiliki ciri khas sebagai Kabupaten dengan jumlah Pesantren yang banyak, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten sehingga layak dikatakan sebagai wilayah Santri/Kabupaten Santri.

Adapun pesantren-pesantren besar yang ada di Kabupaten Jombang adalah :

1. Darul Ulum di Desa Rejoso-Kecamatan Peterongan.
2. Bahrul Ulum di Desa Tambakberas-Kecamatan Jombang.
3. Mambaul Ma'arif di Desa Denanyar-Kecamatan Jombang.
4. Tebu Ireng di Desa Cukir-Kecamatan Diwek.

5. Sidiqiyah di Desa Rejoagung-Kecamatan Ploso dan pondok-pondok pesantren di kecamatan lain.

Terdapat pula pondok pesantren kecil yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan saat ini lebih jelasnya tidak kurang dari 100 pondok.

j. Kawasan Industri

Kegiatan industri di wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari industri kecil, besar dan menengah yang berpeluang berkembang dengan pesat. Kegiatan industri cenderung berkembang kearah kegiatan industri kecil dan industri manufaktur. Wilayah yang berpotensi berkembang ke arah kegiatan industri adalah wilayah perkotaan dan bagian wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Perkembangan kegiatan industri terus meningkat, sehingga dimasa mendatang perlu direncanakan dengan baik alokasi lahan untuk menampung kegiatan industri tersebut. Luas kawasan industri 104,29 Ha dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jombang. Kecamatan Ploso dianggap memiliki potensi yang cukup kuat untuk pengembangan industri, luas kawasan industri di Kecamatan Ploso yaitu 52,65 Ha.

k. Kawasan Hutan Produksi

Luas kawasan hutan di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 adalah 22.564,00 Ha yaitu 21,83 % dari luas keseluruhan Kabupaten Jombang. Adapun kawasan hutan dalam hal ini adalah kawasan hutan produksi yang terbagi atas

KPH Jombang dengan luas 14.621,4 Ha dan KPH Mojokerto dengan luas sebesar 4.072,8 Ha.

2.2 Penataan Prasarana dan Penyediaan Fasilitas Umum

a Prasarana Wilayah

1. Air Bersih

Pelayanan air bersih untuk wilayah Kabupaten Jombang, dilayani oleh PDAM dan ada juga yang masih menggunakan sumur. Untuk air bersih yang dilayani oleh PDAM terdapat di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Diwek, Bareng, Mojoagung, Peterongan, Jombang, Ploso dan Kabuh. Secara keseluruhan jumlah pelanggan 12.727, dimana jumlah pelanggan terbanyak dimiliki oleh rumah tempat tinggal (non niaga) dengan jumlah 11.852. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil wawancara dengan salah satu staff Bappeda yakni Bapak Anang:

“...Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan air bersih masih dirasa belum maksimal karena belum keseluruhan wilayah di Kabupaten jombang terpenuhi oleh pelayanan air bersih, khususnya bagi wilayah yang minim dan sulit untuk mencari sumber mata air yang baku. Hal tersebut juga ditambah dengan permasalahan peningkatan jumlah pelanggan tetapi belum ada penambahan kapasitas debit air bersih kepada para pelanggan...”

(wawancara dengan Staff Bappeda)

Kebutuhan air bawah tanah yang dapat terlayani oleh PDAM Kabupaten Jombang berdasarkan data Dispenda Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. PDAM Jombang yang membawahi wilayah Kecamatan Jombang dan sekitarnya tercatat sebesar 193.536 m³ / tahun

2. PDAM Unit IKK Diwek yang membawahi wilayah Kecamatan Diwek dan sekitarnya tercatat sebesar $19.356 \text{ m}^3 / \text{tahun}$
3. PDAM Unit IKK Kabuh yang membawahi wilayah Kecamatan Kabuh dan sekitarnya tercatat sebesar $19.356 \text{ m}^3 / \text{tahun}$
4. PDAM Unit IKK Ploso yang membawahi wilayah Kecamatan Ploso dan sekitarnya tercatat sebesar $48.384 \text{ m}^3 / \text{tahun}$

2. Listrik

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2004 di Kabupaten Jombang ada 4 UPPTR yang melayani pendistribusian listrik di seluruh kecamatan. Jumlah keseluruhan listrik yang didistribusikan UPPTR tercatat adalah sejumlah 366.051.743 (KWH). Distribusi listrik tertinggi terdapat di UPPTR Jombang dengan jumlah 150.842.805 (KWH).

b. Fasilitas Umum

1. Fasilitas Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 terdapat sekolah Taman Kanak-Kanak sejumlah 320 unit dan terdistribusi merata di setiap kecamatan. Untuk sekolah taman kanak-kanak ini jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Jombang yaitu 45 unit dengan jumlah masing-masing yaitu 44 unit Taman Kanak-kanak swasta dan 1 unit Taman Kanak-kanak negeri.

2. Sekolah Dasar (SD)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 jumlah fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 560 unit SD Negeri dan 22 unit SD Swasta, dengan jumlah keseluruhan adalah 582 unit.

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 jumlah fasilitas pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu 46 unit SLTP Negeri dan 86 unit SLTP Swasta, dengan jumlah keseluruhan adalah 132 unit.

4. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMU)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 jumlah fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMU) yaitu 12 unit SMU Negeri dan 37 unit SMU Swasta, dengan jumlah keseluruhan adalah 49 unit.

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 jumlah fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 7 unit SMK Negeri dan 39 unit SMK Swasta, dengan jumlah keseluruhan adalah 46 unit.

6. MI (Madrasah Ibtidaiyah)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 jumlah fasilitas pendidikan MI yaitu 5 unit MI Negeri dan 257 unit MI Swasta, dengan jumlah keseluruhan adalah 262 unit.

7. MA (Madrasah Aliyah)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2005/2006 jumlah fasilitas pendidikan MA yaitu 10 unit MI Negeri dan 65 unit MA Swasta, dengan jumlah keseluruhan adalah 75 unit.

Adapun persebaran fasilitas pendidikan pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17
Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Jombang Tahun 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Fasilitas (Unit)														Perguruan Tinggi
		TK		SD		SLTP		SMU		SMK		MI		MA		
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
1	Bandar Kedung Mulyo	0	9	20	0	1	1	1	0	0	0	1	13	1	0	0
2	Perak	0	13	25	0	2	4	0	4	0	2	0	12	0	3	0
3	Gudo	0	16	24	0	2	2	0	1	1	0	0	8	0	0	0
4	Diwek	0	13	37	1	2	4	0	2	0	3	0	32	0	14	1
5	Nggoro	0	21	34	1	2	6	1	2	0	6	0	17	1	6	0
6	Mojowarno	0	16	37	1	2	5	0	3	0	1	0	20	0	5	0
7	Bareng	0	16	32	0	2	1	1	0	0	0	0	11	0	1	0
8	Wonosalam	0	16	23	0	2	2	0	0	1	0	0	5	0	2	0
9	Mojoagung	0	19	31	3	3	11	1	3	1	3	0	16	1	4	0
10	Sumobito	0	23	30	3	2	6	0	1	0	2	0	18	0	1	0
11	Jogoroto	0	14	15	1	2	1	1	1	0	1	0	21	0	7	0
12	Peterongan	0	12	24	2	3	6	0	5	0	4	1	11	1	5	1
13	Jombang	1	44	53	7	6	23	3	6	3	11	1	16	4	10	9
14	Megaluh	0	9	24	0	2	1	0	1	0	0	0	10	0	2	0
15	Tembelang	0	16	26	1	2	3	0	2	0	2	0	11	1	1	0
16	Kesamben	0	14	25	1	2	4	1	2	0	1	0	15	0	1	0
17	Kudu	0	10	15	0	1	1	0	2	1	1	1	5	0	0	0
18	Ngusikan	0	6	14	0	2	1	0	0	0	0	0	5	1	1	0
19	Ploso	0	12	19	1	2	3	1	2	0	2	0	5	0	1	0
20	Kabuh	0	12	27	0	2	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0
21	Plandaan	0	8	25	0	2	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0
Jumlah		1	319	560	22	46	86	12	37	7	39	5	257	10	65	11

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2005/2006

Keterangan :

N : Negeri

S : Swasta

Dari hasil data tabel 17, menunjukkan bahwa telah terpenuhinya fasilitas pendidikan di kecamatan Jombang. Hal tersebut juga di dukung dengan terdapat banyaknya jumlah sekolah mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi. Dengan banyaknya sekolah dan terpenuhinya fasilitas pendidikan yang berada pada kecamatan Jombang, maka dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar dari wilayah pinggiran untuk berurbanisasi ke wilayah kota.

2. Fasilitas Peribadatan

1. Masjid/Musholla

Untuk fasilitas peribadatan bagi umat islam ini di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 jumlah keseluruhan masjid sebanyak 1.139 unit dan langgar/musholla sebanyak 3.164 unit. Masjid dan musholla ini tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang

2. Gereja

Di wilayah Kabupaten Jombang jumlah mayoritas penduduknya adalah beragama Islam oleh karena itu tidaklah heran jika di kabupaten ini begitu sedikit kita jumpai gereja baik itu bagi umat katolik maupun bagi umat kristen protestan. Pada tahun 2005 jumlah keseluruhan gereja protestan sebanyak 75 unit dan gereja katolik sebanyak 2 unit.

3. Pura

Fasilitas peribadatan pura pada tahun 2005 di Kabupaten Jombang ini jumlah keseluruhan hanya 6 unit yaitu 2 unit terdapat di Kecamatan Ngoro dan 4 unit di Kecamatan Wonosalam.

4. Vihara

Fasilitas peribadatan Vihara pada tahun 2004 di Kabupaten Jombang ini jumlah keseluruhan hanya 3 unit yaitu 1 unit terletak di Kecamatan Gudo, 1 unit di Kecamatan Mojoagung dan 1 unit di Kecamatan Jombang.

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Jombang secara keseluruhan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, pukesmas keliling, posyandu, polindes, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, rumah bersalin, balai pengobatan, dan bidan.

1. Rumah Sakit Umum

Jumlah fasilitas kesehatan hingga tahun 2005 di Kabupaten Jombang terdapat 7 unit rumah sakit, jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 5 unit, 1 unit terdapat di Kecamatan Diwek dan 1 unit di Kecamatan Mojowarno.

2. Puskesmas

Di Kabupaten Jombang keberadaan Puskesmas pada tahun 2005 sebanyak 34 unit yang keberadaannya tersebar merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Jumlah puskesmas tertinggi terdapat di Kecamatan Jombang dengan jumlah 4 unit.

3. Puskesmas Pembantu

Untuk Puskesmas Pembantu di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 terdapat sebanyak 73 unit yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada

dengan jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 8 unit.

4. Puskesmas Keliling

Untuk Puskesmas Keliling di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 terdapat sebanyak 36 unit mobil yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada dengan jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 4 unit mobil.

5. Posyandu

Keberadaan fasilitas jenis ini di Kabupaten Jombang berjumlah 1.456 unit, dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 135 unit.

6. Polindes

Sedangkan Polindes di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 secara keseluruhan berjumlah 184 unit dan tersebar secara merata di tiap-tiap kecamatan.

7. Rumah Bersalin

Tahun 2005 di Kabupaten Jombang terdapat 6 unit rumah bersalin, dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 3 unit, 1 unit terdapat di Kecamatan Mojoagung, 1 unit di Kecamatan Megaluh, dan 1 unit di Kecamatan Kesamben.

8. Balai Pengobatan

Keberadaan balai pengobatan pada tahun 2005 di Kabupaten Jombang sebanyak 32 unit dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Jombang dengan jumlah 9 unit.

9. Tempat Praktek Dokter Umum

Untuk Dokter Umum di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 terdapat 115 unit dengan jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Jombang yaitu sebanyak 34 unit.

10. Tempat Praktek Dokter Spesialis

Keberadaan Dokter spesialis di Kabupaten Jombang hanya terdapat di Kecamatan Jombang yaitu berjumlah 23 unit.

11. Tempat Praktek Bidan

Praktek Bidan di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 secara keseluruhan berjumlah 253 unit dan tersebar secara merata di tiap-tiap kecamatan.

2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

a. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2005 yaitu 1.163.420 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Adapun jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Jombang yaitu sebesar 118.666 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 26.911, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Ngusikan yaitu sebesar 20.341 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 5.562.

“...Distribusi dan pertumbuhan penduduk saat ini lebih diarahkan ke wilayah kecamatan Ploso, hal tersebut dikarenakan wilayah Jombang

bagian utara (Ploso) telah menjadi kawasan pengembangan sektor industri, dimana secara bersamaan akan muncul wilayah pemukiman di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, hal inilah yang juga akan menjadi tantangan bagi pemerintah Jombang dalam mengevaluasi pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan oleh pihak swasta dalam membangun hunian perumahan...”

Perkembangan penduduk di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan, mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2005 sebesar 2,8%.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di wilayah perencanaan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Jombang
Tahun 2001 – 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
1	Bandar Kedung Mulyo	45.059	45.128	45.223	45.272	45.468	45.545
2	Perak	47.837	48.416	48.695	48.989	49.353	49.373
3	Gudo	52.255	52.532	52.728	52.830	52.916	52.984
4	Diwek	87.363	88.940	91.250	91.559	92.174	92.395
5	Ngoro	64.664	65.201	65.375	65.587	65.581	65.894
6	Mojowarno	79.956	80.641	80.908	81.320	81.399	81.300
7	Bareng	49.124	49.340	49.743	50.114	50.681	50.956
8	Wonosalam	30.561	30.686	30.561	31.026	31.239	31.242
9	Mojoagung	68.893	69.385	70.752	71.328	71.126	71.507
10	Sumobito	73.794	73.867	74.007	74.578	74.472	74.490
11	Jogoroto	53.574	53.686	53.840	53.871	53.893	53.997
12	Peterongan	56.123	56.417	56.953	57.350	57.067	57.174
13	Jombang	117.047	119.546	118.156	118.752	118.666	118.456
14	Megaluh	36.950	37.093	37.195	37.796	37.955	38.006
15	Tembelang	49.592	50.247	50.390	50.794	51.555	51.670
16	Kesamben	60.738	61.095	61.361	61.425	61.357	61.605
17	Kudu	29.466	29.660	29.696	29.718	29.843	29.950
18	Ngusikan	20.258	20.306	21.116	21.162	20.341	20.583
19	Ploso	39.997	40.426	41.684	41.481	41.673	41.793
20	Kabuh	38.345	38.759	38.764	39.005	38.998	38.977
21	Plandaan	36.877	36.965	37.052	37.111	37.663	37.823
Jumlah		1.138.473	1.148.336	1.155.449	1.161.068	1.163.420	1.165.720

Sumber : Kabupaten Jombang Dalam Angka, 2005/2006

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2001-2006, dimana pada kecamatan Jombang yang masih menjadi angka tertinggi jumlah penduduknya, dan kecamatan Diwek

penduduk paling padat kedua, serta kecamatan Mojowarno dengan jumlah penduduk terbanyak pada peringkat ketiga.

b. Jumlah Penduduk Dan Kepadatan

Dilihat dari tingkat kepadatannya, pada tahun 2006 penduduk di Kecamatan Jombang mempunyai tingkat kepadatan paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Jombang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jombang sebesar 3.254 jiwa/Km² dengan luas wilayah sebesar 36,40 Km². Tingkat kepadatan paling rendah yaitu sekitar 257 jiwa/Km² berada di Kecamatan Wonosalam. Pertumbuhan penduduk perkotaan mengalami distribusi lebih tinggi dari penduduk perdesaan dengan pertimbangan efisiensi, pengendalian pemanfaatan lahan, yang diiringi dengan perubahan struktur kegiatan penduduk ke arah padat karya. Berdasarkan perluasan intensitas penggunaan lahan perkotaan dan adanya pengembangan industri pada pusat-pusat kawasan permukiman perkotaan, diharapkan akan merubah struktur distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan.

3. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Implementasi Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pembangunan Kabupaten Jombang

3.1 Faktor Pendorong

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di dalam RTRW Jawa Timur juga, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai pintu gerbang barat menuju kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan)

dan hal ini membuat kawasan Kabupaten Jombang sangat strategis sehingga sangat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang dalam sistem perwilayahan tata ruang Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jombang. Dengan demikian pembagian wilayah pengembangan Kabupaten Jombang merupakan Sub Satuan Wilayah Pengembangan Jombang. Menurut RTRW Kabupaten Jombang wilayah Jombang dibagi dalam 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Setiap SSWP terdiri dari satu atau beberapa kecamatan yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

“Pemerintah Jombang dalam melaksanakan pengembangan pembangunan daerah membagi wilayah menjadi 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana pembagian ini tentu didasarkan pada potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut. Ada juga beberapa daerah yang menjadi wilayah pengembangan perkotaan, seperti Kecamatan Jombang, Kecamatan Ploso, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo”

(wawancara dengan Staff DPU Cipta Karya Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, perkembangan penduduk yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan sistem sarana dan prasarana untuk lingkungan permukiman di Kabupaten Jombang yang menjadikan terpenuhinya kebutuhan prasarana dan fasilitas umum di Kabupaten Jombang. Hal itulah yang dapat dijadikan sebagai pemicu awal berkembangnya potensi daerah.

Perkembangan potensi itu antara lain :

- a. Berkembangnya jalan penghubung yang menghubungkan wilayah Kabupaten Jombang sehingga banyak potensi yang dapat diangkat dan dikembangkan lebih lanjut, serta jalan lokal primer yang

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa.

- b. Tersedianya sumber daya alam maupun manusia sebagai salah satu syarat pengembangan industri. Industri ini nantinya juga akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Jombang.
- c. Adanya pembagian wilayah pengembangan SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan) yang terdapat adanya potensi lokal dari tiap-tiap kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan.
- d. Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.

3.2 Faktor Penghambat

Perkembangan kawasan industri di Kabupaten Jombang yang berjalan cepat, yang mengakibatkan keberadaannya menjadi sarana untuk memberi kemudahan bagi kegiatan industri guna mendorong minat investasi di Kabupaten Jombang. Maka dalam hal ini pemerintah harus dapat memanfaatkan peluang investasi dengan diimbangi produk peraturan yang jelas, supaya jika terdapat pihak swasta dalam berinvestasi menyalahi aturan tata ruang dapat ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada.

“Dalam pelaksanaannya, implementasi tata ruang di Kabupaten Jombang masih terdapat beberapa kendala, seperti masih adanya pihak-pihak swasta atau pemilik industri yang akan mendirikan usahanya tanpa mengetahui aturan perencanaan serta tata guna lahan yang ada serta tidak berkonsultasi kepada pihak pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini” (wawancara dengan Staff DPU Cipta Karya Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa:

- a. Adanya penyimpangan pendirian perusahaan atau industri oleh swasta yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang serta tata guna lahan, sehingga hal ini akan dapat menimbulkan pihak swasta lain mendirikan industrinya tanpa mempedulikan tata ruang yang ada.
- b. Keterbatasan serta adanya pihak pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pengendalian pemanfaatan lahan juga menjadi penghambat, sehingga terdapat pula penyalahgunaan alih fungsi lahan.
- c. Pada laporan evaluasi RTRW dinyatakan bahwa terdapat ketidakkonsistenan pemerintah dalam implementasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan pembangunan wilayah di Jombang, sehingga hal ini akan mengakibatkan disfungsi kegiatan pengembangan pembangunan.

C. Analisis Data Fokus

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pembangunan

Daerah Kabupaten Jombang

1.1 Pembagian Wilayah Pengembangan Pembangunan

Pengembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Jombang telah menetapkan 5 Sub Satuan Wilayah Pembangunan. Wilayah Kabupaten Jombang

terbagi dalam 21 kecamatan, yang mencakup 302 desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Jombang. Kabupaten Jombang memiliki letak pada jalur regional/lintas regional Surabaya – Mojokerto – Kertososno – Kediri/Madiun, Jombang – Babat Lamongan/Bojonegoro dan Jombang – Pare – Kediri serta Jombang – Kandangan – Malang. Hal tersebut dapat dianggap suatu potensi yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan daerah. Di dalam RTRW Jawa Timur juga, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai pintu gerbang barat menuju kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) dan hal ini membuat kawasan Kabupaten Jombang sangat strategis sehingga sangat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang.

Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Ilham (1998 : 85) bahwa kegiatan pengaturan pembangunan dilaksanakan melalui program pokok, salah satunya penataan ruang wilayah daerah dan kota. Setiap pusat SSWP yang telah dilaksanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta keterkaitan kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan antar SSWP. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan perkotaan satu dengan perkotaan lainya dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan disetiap SSWP. Adanya struktur geologi yang beragam membuat Kabupaten Jombang memiliki potensi yang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan adanya arahan pembangunan dan pengembangan melalui pembagian wilayah,

diharapkan nantinya masing-masing wilayah dapat mengembangkan potensi lokal dan sesuai dengan kegiatan utama yang sudah direncanakan.

1.2 Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Didalam penataan Wilayah Gerbangkertasusila Plus tersebut, Kabupaten Jombang merupakan wilayah untuk pengembangan kegiatan Pertanian, Perdagangan, Industri. Dalam konstelasi tersebut Kabupaten Jombang mengambil peran pengembangan pertanian melalui penataan kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Jombang. Perdagangan diarahkan ke perdagangan agribisnis, dan bertumpu pula pada perdagangan pasar tradisonal di kawasan pedesaan atau pasar kecamatan. Kegiatan industri diarahkan untuk industry pengolahan, industri manufaktur dan industri berbasis pertanian dan perkebunan. Sektor industri sangat penting bagi Kabupaten Jombang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 tahun kedepan.

Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1989 : 62-65) bahwa perencanaan tidak lain adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia, yang disusun secara sistematis. Kebijakan pengembangan yang secara fungsi perwilayahan pertanian, perdagangan dan industri di Kabupaten Jombang yang diarahkan oleh RTRW Propinsi Jawa Timur tersebut, dijabarkan secara kewilayah di Kabupaten Jombang sebagai berikut :

- a. Perkembangan kegiatan pertanian diarahkan di 3 Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) yang tersebar di 5 Wilayah Pengembangan.
- b. Perdagangan berkembang di setiap kecamatan dan desa Pusat Pertumbuhan yaitu berbasis di pasar tradisional. Perdagangan skala regional di arahkan di Mojoagung, perdagangan agribisnis di arahkan berpusat di Agropolitan Center Mojowarno di SKPP I.
- c. Kegiatan industri dikembangkan di Perkotaan Ploso untuk industri skala besar dengan menyediakan kawasan industri dan industri manufaktur diarahkan di kawasan industri Bandarkedungmulyo, sedangkan agroindustri berpusat di Perkotaan Mojowarno.

1.3 Strategi Pengembangan Daerah

Penetapan strategi tata ruang melihat isu-isu strategis yang ada dan juga RTRW Jawa Timur. Pengembangan jalan bebas hambatan Kertosono-Surabaya masih menjadi isu andalan Kabupaten Jombang dalam melakukan pengembangan daerah. Keberadaan hutan di Wonosalam membuat pemerintah berkomitmen untuk menjaga luasnya hingga kurang lebih 30% dari luas kawasan wilayah Jombang. Strategi pembangunan yang ada juga nantinya diharapkan dapat menjaga komitmen Kabupaten Jombang untuk mempertahankan swasembada beras di Jombang dan sekaligus mempertahankan wilayah Jombang sebagai salah satu sentra beras di Jawa Timur.

Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Jayadinata (1992 : 2) mengungkapkan bahwa strategi pengembangan adalah memajukan atau

memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Dengan adanya sumber daya alam maupun manusia di Jombang yang sangat mendukung adanya pengembangan daerah yang lebih lanjut. Hal ini selain posisi geografis Jombang yang strategis, juga didukung alam yang berupa hutan dan aliran sungai Brantas yang membelah Jombang. Dengan adanya aliran sungai besar dan wilayah hutan yang cukup luas membuat Jombang memiliki tanah yang subur dan pengairan sawah yang lancar. Sehingga petani Jombang yang sebagian besar menanam padi dapat mempertahankan produksi padi untuk terus dapat swasembada padi daerah, bahkan Jombang dapat selalu menjadi salah satu daerah pemasok kebutuhan beras Jawa Timur.

2. Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Upaya Pengembangan Pembangunan Daerah

2.1 Pemanfaatan Lahan

Wilayah Kabupaten Jombang mempunyai bentuk struktur ruang yang berdasarkan proses pertumbuhan kota lebih kepada sektor-sektor. Struktur seperti ini sesuai yang telah dikemukakan Homer Hoyt dengan *Sector Zone Theory* dalam buku Budi D. Sinulingga (1999 : 25). Hoyt berpendapat bahwa pengelompokan tata guna tanah menjulur seperti irisan kue tart. Pada teori ini terjadi perbedaan kawasan kota berdasarkan jenis pergedungan maupun kelompok penduduk tanpa keterangan latar belakang terjadinya. Tanah yang datar memungkinkan pembuatan jaringan jalan, rel kereta api, dan terusan yang murah. Akibatnya, sebuah kota perindustrian cenderung untuk mekar dengan cara memanjang. Dengan demikian

pula lokasi kota di tepi pelerengan, cenderung mekar melengkung mengikuti bujurana lereng tersebut, ini menyangkut perumahan penduduk.

Pertumbuhan kota berawal diperlintasan jalur selatan jaringan jalan Propinsi Surabaya-Jombang-Solo kemudian pertumbuhannya berkembang ke arah timur menuju Mojokerto yang telah diketahui sudah banyak berdiri industri di perbatasan Mojokerto-Jombang. Untuk wilayah Jombang bagian timur ini, yang masuk kedalam SSWP Mojoagung tidak diperuntukan untuk pendirian industri besar. SSWP Mojoagung seperti telah disampaikan pada penyajian data berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, perdagangan, industri kerajinan dan pendidikan. Namun dengan berjalannya waktu para investor melihat kawasan ini sangat cocok dengan industri besar. Ini terbukti dengan adanya daya dukung jalan luas dan jalan antar propinsi.

Sebenarnya pada RTRW Jombang telah menetapkan SSWP Ploso yang sebagian besar wilayahnya berada di utara Sungai Brantas sebagai kawasan berdirinya industri besar. Namun menurut investor yang ingin mendirikan industri besar, wilayah SSWP Ploso sangat tidak mendukung adanya kegiatan industri besar. Banyak hal yang dikeluhkan jika industri besar berdiri pada SSWP Ploso, antara lain infrastruktur jalan yang tidak memadai dilalui kendaraan besar, masih sempitnya jembatan yang menghubungkan wilayah utara sungai dan selatan sungai. Selain itu telah diketahui bahwa kawasan SSWP Ploso merupakan wilayah yang sulit air karena keadaan tanahnya sangat keras dan tandus.

Selanjutnya Tarigan (2005 : 50) mengemukakan bahwa “perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan

tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya pada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan". Peneliti melihat hal pemanfaatan lahan ini memang sudah tidak sesuai dengan RTRW daerah. Dan pemerintah seharusnya dapat bertindak dan peka terhadap permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten Jombang seharusnya dapat memberi rekomendasi atau sanksi kepada para investor yang tidak tertib aturan. Sesuai pengakuan pihak pemerintah daerah bahwa pemerintah disini hanya dapat memberi rujukan kepada para investor tetapi tidak dapat memutuskan pendiriannya. Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah hanyalah mengevaluasi dan selanjutnya menyesuaikannya.

Lalu untuk kawasan peruntukan pertanian memang tidak terdapat masalah yang cukup serius dalam pelaksanaannya. Dan memang dalam perencanaan disetiap SSWP pertanian menjadi hal paling utama untuk masuk dalam rencana kawasan. Yang menjadi kendala hanyalah sanggup atau tidak kawasan peruntukan pertanian Jombang dapat dipertahankan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan fakta yang ada terdapat penurunan peruntukan kawasan pertanian dari tahun ke tahun dikarenakan tergusur oleh pemukiman. Dan yang dilakukan pemerintah saat ini haruslah mengendalikan pemukiman yang berdiri agar pertanian tidak tergusur.

Selanjutnya adalah kawasan peruntukan sumber daya alam. Untuk peruntukan kawasan ini di Kabupaten Jombang, peneliti melihat yang besar adalah pemanfaatan pasir kali, dimana terdapat penggalian pasir yang terdapat di sekitar Sungai Brantas. Dan penggalian yang dilakukan sangat banyak tidak

memperhatikan lingkungan. Penggunaan mesin yang sangat dilarang keras oleh pemerintah sungguh tidak diperhatikan para penggali. Pelarangan ini dikarenakan menurut survei pemerintah daerah bahwa penggalian mengguakan mesin mempercepat perusakan daerah aliran sekitar sungai (DAS) dan membuat tanggul sepanjang sungai sering ambles. Selain itu penggalian ilegal ini juga dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba.

2.2 Penataan Prasarana dan Penyediaan Fasilitas Umum

Penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum, baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan suatu bentuk upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pemerintah. Melalui penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Hal ini agar kualitas hidup masyarakat dapat terjamin dengan baik dan dapat ditingkatkan baik dilihat secara individu maupun secara utuh sebagai masyarakat Jombang.

Pembangunan sarana dan prasarana kota merupakan hal yang mutlak bagi masyarakat kota serta sangat bersifat strategis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hody (1987 : 6):

“Pembangunan kota, pembangunan sarana dan prasarana mempunyai kedudukan yang strategis, tentang khususnya pada pembentukan pusat-pusat pembangunan yang mempunyai fungsi penting, baik dalam pembangunan wilayah maupun dalam rangka pembentukan satu kesatuan ekonomi sosial yang dicita-citakan.”

Penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum (fasum) berupa pembangunan fisik dapat menjadi salah satu dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik diperkotaan maupun diperdesaan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang dapat lebih terpacu

untuk hal-hal yang berkaitan dengan penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum yang mencakup keselamatan, keamanan dan kenyamanan bangunan gedung, teradministrasikannya aset negara dengan lebih baik, penataan lingkungan kumuh, peremajaan permukiman tradisional dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan permukiman baik di kota maupun di perdesaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkesinambungan. Permukiman adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, proses pembebasan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Usulan sub bidang : pengembangan permukiman disesuaikan dengan kondisi lapangan yang sangat prioritas segera ditangani dan berdasarkan kemampuan dana APBD Jombang.

Upaya pengembangan permukiman saat ini dirangsang pada daerah pinggiran kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan pusat kota dan sebagai persebaran penduduk yang nantinya dapat juga merangsang adanya persebaran pelayanan masyarakat. Sehingga pemerataan dan keadilan pembangunan baik kota maupun desa dapat terwujud.

2.3 Distribusi Dan Kepadatan Penduduk

Dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terkendali, maka permasalahan kependudukan Jombang tidak terlalu mengganggu perkembangan kota. Hanya saja pada tingkat kepadatan penduduk yang memusat pada wilayah tertentu khususnya yang memiliki fasilitas-fasilitas untuk aktivitas social ekonomi. *Multiple nuclei Theory* dalam buku Budi D. Sinulingga (1999 : 25) menyebutkan bahwa terjadinya pengelompokan tata guna tanah dengan perhitungan keuntungan ekonomis, misalnya saja bahwa industri akan mencari lokasi yang dekat dengan pusat sumber daya baik manusia maupun alam dan perumahan baru akan mencari lokasi yang dekat dengan pusat rekreasi ataupun pusat perbelanjaan.

Menurut pandangan masyarakat tradisional, bahwa mereka lebih suka tinggal berdekatan dengan sanak saudara. Sehingga tidak mengherankan apabila dengan pemikiran seperti itu menyebabkan konsentrasi penduduk memusat pada satu wilayah tertentu. Keadaan demikian dapat diantisipasi dengan upaya pendekatan sosial. Selain itu perlu juga pemerintah daerah mengembangkan pemerataan distribusi ekonomi dan kesempatan berusaha, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak bagi kelangsungan hidupnya. Dan oleh karena itu pemerataan distribusi fasilitas sosial ekonomi di seluruh wilayah perlu dilakukan, termasuk juga pada daerah-daerah pinggiran kota.

Upaya untuk perkembangan distribusi penduduk di Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara merangsang daerah pinggiran cukup baik. Terbukti seperti

pada Kecamatan Wonosalam, kecamatan terluar yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri saat ini begitu intens untuk mengembangkan wisata alam dan diharapkan dengan adanya wisata ini nantinya dapat menarik wisatawan dan juga membantu persebaran penduduk Jombang. Namun perlu juga diperhatikan akan kebutuhan sarana pendukung permukiman yang memadai agar usaha mewujudkan kehidupan nyaman dan sejahtera masyarakat Jombang dapat terwujud.

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pembangunan Kabupaten Jombang

3.1 Faktor Pendorong

Keberadaan Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai pintu gerbang barat menuju kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) dan hal ini membuat kawasan Kabupaten Jombang sangat strategis sehingga sangat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang. Dengan mempertimbangkan bahwa wilayah GKS Plus nantinya harus dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi andalan Propinsi Jawa Timur, maka keberadaan Kabupaten Jombang sebagai bagian dari sistem pengembangan harus dapat mengembangkan diri dengan melihat peluang yang ada dengan baik. Baik dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun penyediaan sarana dan

prasarana penunjang yang dapat mendukung terwujudnya sistem perwilayahan GKS Plus.

Sejalan dengan Abdul Yuli Andi Gani (1992 : 10) bahwa tata ruang secara harfiah berasal dari kata spatial, yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan. Tegasnya tata ruang berkaitan dengan penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai tempat menyelenggarakan kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa letak Kabupaten Jombang yang strategis dan dilalui jalur jalan yang menghubungkan beberapa kota di Jawa Timur yang dapat dikatakan kota besar dengan potensi industri besar dapat menjadi peluang pengembangan yang baik dan berarti secara ekonomis baik bagi pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat. Khususnya juga menunjang keberadaan Kabupaten Jombang dalam menjalankan fungsinya dengan kegiatan perdagangan, pusat ekspor/impor, dan juga adanya pengembangan sebagai salah satu pusat sentra beras.

3.2 Faktor Pengambat

Adanya potensi dan prospek yang mendukung pengembangan dari segi infrastruktur fisik membuat pemerintah Kabupaten Jombang harus giat dalam mengatur tata ruang yang ada. Agar pemanfaatan dan pengendalian pola dan ruang daerah dapat dimanfaatkan dengan baik, serta kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai dengan baik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tarigan (2005 : 58) mengungkapkan bahwa setiap rencana tata ruang Kabupaten/Kota harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa:

- a. tujuan pemanfaatan ruang,
- b. struktur dan pola pemanfaatan ruang,
- c. pola pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa rencana memang mudah untuk dibuat, tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak sejalan dengan pelaksanaan yang ada. Terdapatnya penyalahgunaan pemanfaatan tata guna lahan pada kawasan industri, yang dianggap menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk itu konsistensi pemerintah dalam implementasi tata ruang sangat perlu dijaga dan dilakukan secara baik. Meskipun dalam implementasi memerlukan aparat yang tidak sedikit, setidaknya aturan tegas harus ditetapkan sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan juga perlu adanya sosialisasi setiap produk kebijakan tata ruang secara berkala kepada masyarakat. Sehingga dalam kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam melakukan pembangunan dan pengembangan daerah menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan daerah

a. Dasar Hukum Kebijakan Tata Ruang Wilayah

Legalitas kebijakan tata ruang di Kabupaten Jombang adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.

b. Pembagian Wilayah Pembangunan

Dalam perkembangan pembangunan perkotaan di wilayah Kabupaten Jombang, pemerintah Jombang membagi wilayah menjadi 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana pembagian ini tentu didasarkan pada potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut. Ada juga beberapa daerah yang menjadi wilayah pengembangan perkotaan, seperti Kecamatan Jombang, Kecamatan Ploso, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bandarkedungmulyo.

c. Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Adapun beberapa wilayah kecamatan yang menjadi wilayah pengembangan. (WP) Wilayah Pengembangan Kabupaten Jombang meliputi :

1. Wilayah Pengembangan (WP) Jombang.

a. Fungsi :

- 1) WP Jombang merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten Jombang.
- 2) Fungsi WP Jombang sebagai pusat pelayanan skala kabupaten yang meliputi : pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala Kabupaten Jombang.

2. Wilayah Pengembangan (WP) Mojoagung

a. Fungsi :

- 1) sebagai wilayah pengembangan kawasan perekonomian terpadu Kabupaten Jombang.
- 2) sebagai pusat koleksi dan distribusi (perdagangan) skala Kabupaten Jombang.

3. Wilayah Pengembangan (WP) Ploso

a. Fungsi:

- 1) Wilayah pengembangan kegiatan perkotaan dan bukan pertanian di bagian utara Kabupaten Jombang.
- 2) Merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.

4. Wilayah Pengembangan (WP) Bandar Kedungmulyo

a. Fungsi WP Bandar Kedungmulyo :

- 1) Wilayah pengembangan pusat permukiman perkotaan di bagian selatan Jombang
- 2) Sebagai kawasan industri manufaktur.

5. Wilayah Pengembangan (WP) Mojowarno

a. Peran Dan Fungsi Utama WP Mojowarno :

- 1) WP Mojowarno adalah sebagai pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Jombang.
- 2) Sebagai wilayah pengembangan potensi Sumber Daya Alam dan wilayah pengembangan Pariwisata di wilayah Kabupaten Jombang. Dalam rangka mendukung fungsi tersebut perlu dikembangkan pusat penelitian dan pendidikan untuk pengembangan SDM yang diarahkan disektor Agrobisnis.

2. Pemanfaatan Tata Ruang Dalam Upaya Pengembangan Pembangunan Daerah

a. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan kawasan industri merupakan pemanfaatan kawasan budidaya yang cenderung tidak terdata dengan baik. Perkembangan pemanfaatan ruang industri yang berkembang di sekitar jalan arteri ruas Peterongan hingga Mojoagung merupakan yang terpesat. Kegiatan industri juga memanfaatkan ruang di koridor jalan ruas Perak – Bandar Kedungmulyo. Kegiatan industri kecil atau rumah tangga berkembang di

Kecamatan Perak dan Gudo. Agro industri juga ada di Kecamatan Plandaan dan dalam skala yang lebih kecil berada di Wonosalam. Pola perkembangan kawasan permukiman cenderung berpola linier. Perkembangan kawasan permukiman masih didominasi oleh permukiman informal. Pola perkembangan berpola dua, yaitu secara linier dan cenderung memusat di kawasan perkotaan Jombang dan Perkotaan Kecamatan lain. Kawasan permukiman yang berkembang cukup pesat adalah di Kecamatan Jombang, Diwek, Gudo, Tembelang, Mojoagung dan Kesamben.

b. Penataan Prasarana dan Fasilitas Umum

Penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum (fasum) berupa pembangunan fisik dapat menjadi salah satu dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik diperkotaan maupun diperdesaan. Hal tersebut tercermin oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah terpenuhinya prasarana wilayah seperti jaringan air bersih dan jaringan listrik. Serta juga terpenuhinya fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan.

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Adapun jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Jombang yaitu sebesar 118.666 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 26.911, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Ngusikan yaitu sebesar 20.341 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 5.562.

Perkembangan penduduk di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan, mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2005 sebesar 2,8%.

Dilihat dari tingkat kepadatannya, pada tahun 2006 penduduk di Kecamatan Jombang mempunyai tingkat kepadatan paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Jombang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jombang sebesar 3.254 jiwa/Km² dengan luas wilayah sebesar 36,40 Km². Tingkat kepadatan paling rendah yaitu sekitar 257 jiwa/Km² berada di Kecamatan Wonosalam.

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pembangunan Kabupaten jombang

- a. Faktor Pendorong
 1. Wilayah Jombang yang berada pada kawasan Gerbangkertosusila yang menjadikan perkembangan di daerah Jombang tumbuh pesat baik dari sektor industri, perdagangan, hunian dan investasi.
 2. Terpenuhinya aspek prasarana wilayah dan fasilitas umum.
 3. Perkembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung.
- b. Faktor Penghambat
 1. Adanya penyalahgunaan pemanfaatan lahan pada sektor insutri.
 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menyebabkan inkonsistensi tata ruang wilayah.

3. SDM yang kurang memadai sehingga pengawasan dan pengendalian tata ruang lemah.

B. Saran

Sebagai akhir dari seluruh kajian, peneliti merasa perlu memberikan saran serta masukkan dalam mewujudkan penataan ruang dalam pengembangan pembangunan perkotaan di wilayah Kabupaten Jombang yang lebih komprehensif serta memperhatikan berbagai kepentingan seluruh stakeholder. Saran ini diberikan penulis setelah melihat hasil dan fakta di lapangan. Adapun saran atau rekomendasi yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya tingkat koordinasi lebih seimbang dan efektif yang harus dilakukan oleh koordinator tertinggi di daerah Kabupaten Jombang yaitu Bupati serta Sekda, sehingga terjadi hubungan yang seimbang antara instansi perencana dalam hal ini Bappeda maupun instansi implementator dalam hal ini Dinas PU agar kedua instansi tersebut tidak saling ego sektoral.
2. Perkembangan ekonomi akan lebih difokuskan pada pengembangan sentra-sentra produksi agropolitan, pariwisata, pertambangan dan pengembangan industri menengah hingga industri besar.
3. Perkembangan infrastruktur diarahkan untuk menjamin aksesibilitas disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan agropolitan.
4. Faktor eksternal dimana Kabupaten Jombang yang nantinya akan dilewati jaringan jalan bebas hambatan Kertosono-Mojokerto, jalan arteri, jalur

kereta api komuter, serta sebagai gerbang masuk Gerbangkertosusila Plus dari barat, maka yang diperlukan penanganan khusus terhadap wilayah Kabupaten Jombang yang merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

5. Pelestarian dan konservasi kawasan strategis daya dukung lingkungan yakni sumber daya air pada sungai Brantas, Waduk Beng, serta Waduk Jarak.
6. Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.
7. Menjalankan koordinasi dan komunikasi antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Jombang serta memberikan perijinan yang selektif dalam implementasi tata ruang agar deviasi dalam pemanfaatan lahan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Firman, Sirait Martin. 1984. *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa dan Kota dan Permasalahannya*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Gallion, Arthur B. dan Simon Eisner. 1994. *Pengantar Perencanaan Kota : Desain dan Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga
- Gani, Abdul Y. A. 1992. *Beberapa Masalah Dalam Pemerintahan Kota*. Malang: BPP FIA Unibraw
- Ilham. 1998. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jayadinata, Johara T. 1992, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Desa, Perkotaan, Dan Wilayah*, Bandung : ITB
- Milles, B.M dan Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siagian, Sondang P. 1982. *AdministrasiPembangunan. Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung
- Sinulingga, Budi D. 1999. *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional Dan Lokal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan (Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah)*. Jakarta : CV. Rajawali
- Sujarto, Djoko.2003. *Pengembangan Kota Baru*. Jakarta: Gunung Agung
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakanaksanaan Perencanaan Pemrogaman Dan*

Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta :
CV Rajawali

Tarigan, Robinson, M.R.P. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara

Thaib, Dahlan. 2000. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta:
Liberty

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:
LP3ES

----- 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

----- 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung

----- 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES

Wahab, Solichin A. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Profil Kabupaten Jombang diakses tanggal 1 Mei 2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang

Portal Pemerintah Kabupaten Jombang diakses tanggal 1 Mei 2011
<http://www.jombangkab.go.id/>

Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jombang diakses tanggal 1 Mei 2011
<http://www.jombangkab.go.id/e-gov/SatKerDa/satkerda.asp?menu=ck>

Sejarah Singkat kabupaten jombang diakses tanggal 1 Mei 2011
<http://www.jombangkab.go.id/profile.asp.htm>

Perencanaan_tata_ruang, diakses tanggal 1 Maret 2011 dari
<http://id.wikipedia.org/wiki/>

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Jombang Nomor 19 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

Daftar Wawancara:

1. Bagaimana dasar hukum kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Jombang?
2. Bagaimanakah implementasi tata ruang wilayah di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana pembagian wilayah pembangunannya yang telah terlaksana di Kabupaten Jombang sejauh ini?
4. Bagaimanakah upaya perencanaan pemerintah daerah dalam terwujudnya perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu?
5. Bagaimanakah pembagian sistem dan fungsi perwilayahan di Kabupaten Jombang serta strategi pengembangan daerahnya?
6. Bagaimana pemanfaatan lahan di Kabupaten Jombang yang telah terealisasi sampai sejauh ini serta bagaimana dampaknya?
7. Dalam hal penataan prasarana dan penyediaan fasilitas umum, apakah pihak Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang telah melaksanakannya sesuai dengan RTRW yang ada?
8. Apasajakah usaha pemerintah daerah dalam menghadapi laju perkembangan wilayah setelah ditetapkannya wilayah Kabupaten Jombang ke dalam kawasan Gerbangkertosusila?
9. Apakah pelaksanaan distribusi dan kepadatan penduduk sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Jombang?
10. Bagaimana menurut anda faktor-faktor yang mendorong dalam implementasi tata ruang ini?
11. Bagaimana menurut anda faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi tata ruang ini?

Lampiran 8. Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Jl. YOS. SUDARSO NO.80, telp. (0321) 864123
JOMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/ 718 /415.24/20. 11

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : ZAENAL FACHRUDIN
N I M : 0710313041
Instansi : Universitas Brawijaya Malang
Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan/ Konsentrasi : Administrasi Publik/ Non Konsentrasi
Alamat : Jl. Gubernur Suryo No.56 Jombang

telah melaksanakan penelitian/ riset pada Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang selama 2 bulan, mulai tanggal 26 April s/d 25 Juni 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 24 Juni 2011

a.n. KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN JOMBANG
Sekretaris,



Dr. SUGIANTO, M.Si

Pembina

NIP. 19610504 198509 1 001

Lampiran 7. Surat Penelitian





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
 Jl. Merdeka No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
 J O M B A N G

SURAT IZIN

Nomor : 072/208/415.21/2011

T E N T A N G

IZIN PENELITIAN / SURVEY

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
 - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/9/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
 - Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 19 April 2011 Nomor : 3448 / UN10.3 / PG / 2011 Perihal Penelitian / Riset

M E N G I Z I N K A N

Kepada

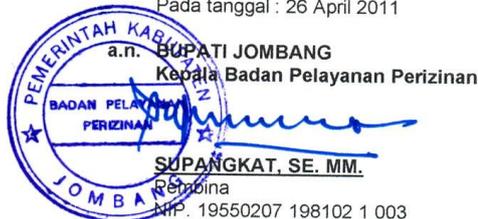
Nama : ZAENAL FACHRUDIN
 NIM : 0710313041
 Program Studi : Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang
 Kegiatan : Penelitian / Survey
 Waktu : 26 April 2011 s/d 25 Juni 2011
 Judul Penelitian : Implementasi Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Pembangunan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Jombang
 Lokasi : 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
 2. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membawa manfaat bagi semua pihak
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait
- Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan penelitian / survey yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan penelitian / survey yang dimaksud
- Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan penelitian / survey dimaksud.

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian / Survey supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Badan Pelayanan Perizinan.

Ditetapkan di : Jombang
 Pada tanggal : 26 April 2011



Tembusan, Yth Saudara :

- Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Masyarakat Kab. Jombang
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
- Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
- Yang bersangkutan.



CURRICULUM VITAE

- Nama : Zaenal Fachrudin
- Nomor Induk Mahasiswa : 0710313041
- Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 15 Desember 1987
- Pendidikan : 1. SDN Jombatan 3 Jombang - Tamat Tahun
2000
- : 2. SMP Negeri 2 Jombang - Tamat Tahun 2003
- : 3. SMA Negeri 3 Jombang - Tamat Tahun 2006
4. Universitas Brawijaya, tercatat sebagai
mahasiswa aktif sampai sekarang

